

ANALISIS PENGARUH KEMISKINAN, PENGANGGURAN, PDRB, IPM
TERHADAP KETIMPANGAN REGIONAL DI PROVINSI JAMBI

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Nama : Muhammad Raihan Rizky Ramadhan

Nim : 19313306

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

2023

ANALISIS PENGARUH KEMISKINAN, PENGANGGURAN, PDRB, IPM
TERHADAP KETIMPANGAN REGIONAL DI PROVINSI JAMBI

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan,
Pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Nama : Muhammad Raihan Rizky Ramadhan

Nim : 19313306

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang menulis dan menandatangani pernyataan ini menyatakan bahwa saya telah dengan sungguh-sungguh menulis skripsi ini dan tidak ada bagian yang termasuk dalam tindakan plagiasi sebagaimana dijelaskan dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UH. Jika suatu saat terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya siap menerima konsekuensi atau sanksi apa pun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, Juli 2023

Penulis,



Muhammad Raihan Rizky Ramadhan



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fbe@uii.ac.id
W. fbe.uii.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada Semester Genap 2022/2023, hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir/Skripsi yang disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD RAIHAN RIZKY RAMADHAN
NIM : 19313306
Judul Tugas Akhir : Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran, PDRB, IPM Terhadap Ketimpangan Regional di Provinsi Jambi
Dosen Pembimbing : Aminuddin Anwar, SE.,M.Sc.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir (Skripsi) tersebut dinyatakan:

Lulus

Nilai : A
Referensi : Layak ditampilkan di Perpustakaan

Tim Penguji:

Ketua Tim : Aminuddin Anwar, SE.,M.Sc.

Anggota Tim : Rokhedi Priyo Santoso, SE., MIDEc.

Yogyakarta, 07 Agustus 2023

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan,



Abdul Hakim, SE, M.Ec., Ph.D.
NIK 963130101

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran, PDRB, IPM Terhadap Ketimpangan Regional di Provinsi Jambi

Disusun oleh : MUHAMMAD RAIHAN RIZKY RAMADHAN

Nomor Mahasiswa : 19313306

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Senin, 07 Agustus 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Aminuddin Anwar, SE.,M.Sc.


.....

Penguji : Rokhedi Priyo Santoso, SE., MIDEc.


.....

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia
* YOGYAKARTA *
Jonah Atmaja, S.E., M.Si., Ph.D.



HALAMAN MOTTO

وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا

"Wa lam akum bidu'a`ika rabbi syaqiyyā"

"Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku"

Doa ibu seluas langit biru dan aku berlindung dibawahnya

Belajarlah dari masa lalu dan jadilah lebih baik karna, Setiap detik dalam hidup adalah perjalanan, setiap perjalanan adalah pelajaran

HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatub

Alhamdulillah. puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan saya dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Segala perjuangan saya hingga titik ini, saya persembahkan teruntuk orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat, menjadi alasan saya kuat sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

1. Bapak Aminuddin Anwar, S.E., M.Sc Sebagai dosen pembimbing skripsi yang selama ini sudah membantu memberikan arahan dan masukan selama proses pengerjaan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini.
2. Papa, Mama, serta Adik saya sebagai support system yang selalu mendukung dan mendoakan secara tulus lahir dan batin untuk penulis agar diberi kemudahan sampai menyelesaikan skripsi dengan baik.
3. Teman-teman keluarga kedua saya (Adi, Arlen, Ojan, Hafiz, Raudi, Zaki.) yang selalu memberikan dukungan selama pembuatan skripsi ini serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan Terima Kasih sudah menjadi sahabat serta keluarga untuk kehidupan saya selama ini. Saya persembahkan skripsi ini untuk kalian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatub

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan ridho, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran, PDRB, IPM Terhadap Ketimpangan Regional di Provinsi Jambi**. Penyusunan skripsi diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Dalam menyelesaikan skripsi, penulis menyadari terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun cara menyajikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan kritik dan saran untuk skripsi ini yang bersifat membangun sebagai upaya menghasilkan dan menyelesaikan penelitian dengan baik dan maksimal. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan petunjuk, pencerahan, kemudahan serta ridho, dan kasih sayang yang tiada terkira kepada setiap hamba-Nya, dan tanpa terkecuali kepada penulis.
2. Motivator sejati Papa Tercinta Rian Irmansyah, dan mama tersayang Fitriyati, serta Adik tercinta saya Regita Andari Aisyah Putri dan seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Aminuddin Anwar, S.E., M.Sc. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
4. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D selaku dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

5. Bapak Abdul Hakim.,S.E., M.Sc., Ph.D selaku ketua program studi Ekonomi Pembangunan program sarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Seluruh Dosen dan Staff Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
7. Seluruh keluarga besar Lembaga Pers Mahasiswa
8. Seluruh keluarga besar Ilmu Ekonomi angkatan 2019

Wassalamualaikum Warahmatullabi Wabarakatuh

Yogyakarta, Juni 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'R' with a horizontal line through it, followed by a short horizontal stroke.

Muhammad Raihan Rizky Ramadhan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi Ketimpangan Regional 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2011-2022. Adapun variabel dependen yaitu Ketimpangan Regional (Gini Rasio) sedangkan variabel independen yaitu, Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jenis data yang digunakan adalah data panel, dengan 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebagai *cross section*, serta tahun 2011-2022 merupakan *time series*. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistika, dengan menggunakan metode analisis data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan, variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Regional. Sedangkan variabel PDRB dan TPT tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Regional

Kata Kunci: *Ketimpangan Regional, Kemiskinan, TPT, PDRB, IPM*

DAFTAR ISI

Halaman Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iii
Halaman Pengesahan Ujian.....	v
Halaman Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Halaman Abstrak.....	x
Halaman Daftar Isi.....	xi
Halaman Daftar Tabel	xiv
Halaman Daftar Gambar.....	xv
Halaman Daftar Lampiran.....	xvi
BAB I.....	17
PENDAHULUAN.....	17
1.1. Latar Belakang.....	17
1.1. Rumusan Masalah	25
1.2. Tujuan Penelitian.....	26
1.3. Manfaat Penelitian.....	26
1.4. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II.....	28
2.1. Penelitian Terdahulu	28
2.2. Landasan Teori.....	32

2.2.1.	Ketimpangan Regional (Gini Rasio).....	32
2.2.2.	Kemiskinan.....	36
2.2.3.	Pengangguran (TPT).....	37
2.2.4.	Produk domestik bruto (PDRB).....	39
2.2.5.	Indeks pembangunan manusia (IPM).....	41
2.3.	Kerangka Pemikiran.....	42
2.4.	Hipotesis.....	43
BAB III.....		44
METODE PENELITIAN.....		44
3.1	Jenis dan Cara Pengumpulan Data.....	44
3.2	Definisi Operasional Variabel.....	44
3.3.	Metode Analisis.....	45
3.3.1.	Common Effect Models.....	46
3.3.2.	Fixed Effect Models.....	46
3.3.3.	Random effect models.....	47
3.3.4.	Uji Lagrange Multiplier (LM).....	47
3.3.5.	Uji Chow (Uji F-statistik).....	48
3.3.6.	Uji Hausman.....	48
3.3.7.	Pengujian Hipotesis.....	49
BAB IV.....		52
HASIL ANALISIS.....		52
4.1.	Analisis Deskriptif Data.....	52
4.2.	Regresi Data Panel.....	53

4.2.1.	Pemilihan Model	54
4.2.2.	Uji Chow	54
4.2.3.	Uji Lagrange Multiplier (LM)	55
4.2.4.	Uji Hausman.....	55
4.3.	Model Regresi Terbaik.....	56
4.3.1.	Koefisien Determinasi (R-Squared).....	57
4.3.2.	Uji Analisis F-Statistik.....	57
4.3.3.	Uji Analisis T-Statistik.....	57
4.3.4.	Analisis Ekonomi.....	59
BAB V	65
PENUTUP	65
5.1.	Kesimpulan.....	65
5.2.	Implikasi.....	65
Halaman Daftar Pustaka	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jambi 2018-2022	19
Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jambi 2018-2022	21
Tabel 1.3 Ketimpangan (Gini Rasio) 10 Provinsi di Pulau Sumatera 2018-2022.....	23
Tabel 1.4 Ketimpangan (Gini Rasio) 11 Kab/Kota di Provinsi Jambi 2018-2022.....	23
Tabel 2.1 Perhitungan Gini Rasio	33
Tabel 4.1 Deskriptif Data Penelitian (%).....	52
Tabel 4.2 Hasil Estimasi Regresi Model Panel Menggunakan Common Effect Models, Fixed Effect Models, dan Random Effect Models	53
Tabel 4.3 Hasil Uji Chow	54
Tabel 4.4 Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM)	55
Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman.....	55
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Fixed Effect Models.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kurva Lorenz.....	35
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Data Penelitian.....	72
Lampiran B Hasil Estimasi Random Effect Models.....	78
Lampiran C Hasil Estimasi Fixed Effect Models.....	79
Lampiran D Hasil Estimasi Common Effect Models.....	80
Lampiran E Hasil Uji Chow.....	81
Lampiran F Hasil Uji Hausman.....	82
Lampiran G Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM).....	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses yang terus-menerus dilakukan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses pembangunan suatu negara atau daerah, tidak dapat diabaikan bahwa ada berbagai masalah yang harus dihadapi. Salah satu isu yang sangat kompleks dan serius adalah ketimpangan pendapatan, yang disebutkan oleh word bank, (2016) dalam laporannya. Permasalahan ini melibatkan banyak aspek, termasuk faktor manusia, karakteristik alam, dan kondisi geografis yang beragam di setiap negara atau daerah. Umumnya, fokus pembangunan terarah pada pengembangan ekonomi melalui upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan dihubungkan dengan upaya meningkatkan pendapatan per individu, yang sering dikenal sebagai strategi pertumbuhan ekonomi. Diharapkan bahwa dengan meningkatnya pendapatan per individu, masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan dapat diselesaikan. Oleh karena itu, strategi pembangunan harus mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan potensi manusia. Dengan mempertimbangkan tujuan dan strategi pembangunan tersebut, implementasi pembangunan harus difokuskan pada hal-hal yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dapat dijelaskan sebagai suatu proses yang melibatkan berbagai perubahan dalam pertumbuhan ekonomi, pendapatan, dan tingkat kemiskinan. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Pengambil kebijakan dan para ahli ekonomi bisa dikatakan kurang memberi perhatian yang memadai terhadap isu ketimpangan pendapatan, karena fokus utama mereka cenderung lebih pada pertumbuhan ekonomi dan masalah kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan sebagai keadaan dimana pendapatan meningkat dari waktu ke waktu. Namun, ketidakmerataan dalam proses pembangunan ekonomi dapat

memicu pembagian penghasilan pendapatan antar wilayah, seperti yang diungkapkan oleh Putri dan Erita, (2019)

Indonesia adalah sebuah negara yang sedang mengalami proses pembangunan ekonomi yang terus berlangsung. Pembangunan ekonomi menjadi faktor kunci dalam kemajuan negara. Namun, Indonesia menghadapi berbagai kendala dalam melaksanakan pembangunan, termasuk keterbatasan modal, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, dan tantangan kemiskinan lainnya. Penting untuk segera mengatasi kendala-kendala tersebut agar proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan untuk Provinsi Jambi memiliki keunggulan strategis baik dari pandangan geografis atau kesanggupan ekonominya. Provinsi Jambi menawarkan potensi yang besar dalam pengembangan sektor perkebunan dan kehutanan karena memiliki variasi geografis yang meliputi dataran tinggi dan rendah. Provinsi Jambi juga menduduki posisi ekonomi yang strategis berkat lokasinya yang berada di tengah pulau sumatera dan berbatasan langsung dengan setidaknya enam provinsi lainnya di wilayah sumatera. Dalam aspek sosial dan demografi, provinsi jambi menunjukkan keragaman yang mengesankan, ditandai dengan situasi sosial yang stabil, tingkat kriminalitas yang rendah, serta risiko bencana alam yang minim. Provinsi Jambi telah mengesahkan sasaran pembangunan tahun 2020 yang difokuskan pada meningkatkan daya saing wilayah melalui peningkatan mutu produk-produk unggulan lokal. Alasan pemilihan judul ini adalah karena observasi terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi, kurangnya daya saing produk lokal dalam persaingan dengan produk lain, serta kontribusi yang minim dari sektor industri tercermin dalam penurunan kontribusinya terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) dari tahun ke tahun djp bkemenkeujambi, (2020) Umumnya, fokus pembangunan terarah pada pengembangan ekonomi melalui upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan dihubungkan dengan upaya meningkatkan pendapatan per individu, yang sering dikenal sebagai strategi pertumbuhan ekonomi. diharapkan bahwa dengan meningkatnya pendapatan per individu, masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan dapat diselesaikan. Oleh karena itu, strategi pembangunan harus mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan potensi manusia. Dalam rangka mencapai peningkatan mutu kehidupan dan kemakmuran masyarakat,

dibutuhkan kenaikan dalam pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan pembagian penghasilan pendapatan yang adil. Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung melalui nilai produk domestik regional bruto (PDRB) dan tingkat pertumbuhannya. Peningkatan kemampuan ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa merupakan konsep yang dikenal sebagai pertumbuhan ekonomi. Konsep ini digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja tambahan dan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Pasaribu et al., 2022).

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera Tahun 2018-2022

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	4.61	4.14	-0.37	2.79	4.21
Sumatera Utara	5.18	5.22	-1.07	2.61	4.73
Sumatera Barat	5.14	5.01	-1.62	3.29	4.36
Riau	2.35	2.81	-1.13	3.36	4.55
Kepulauan Riau	4.47	4.83	-3.80	3.43	5.09
Jambi	4.69	4.35	-0.44	3.66	5.13
Sumatera Selatan	6.01	5.69	-0.11	3.58	5.23
Kepulauan Bangka Belitung	4.45	3.32	-2.30	5.05	4.40
Bengkulu	4.97	4.94	-0.02	3.24	4.31
Lampung	5.23	5.26	-1.67	2.79	4.28

Sumber : Badan Pusat Statistik (2022)

Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera mengalami penurunan signifikan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian. Akibatnya, anggaran daerah yang semula dialokasikan untuk pembangunan daerah dan keperluan lainnya terpaksa ditunda dan dialihkan untuk upaya pemulihan ekonomi daerah. Keterlibatan pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam meningkatkan kinerja ekonomi regional dan kesejahteraan masyarakat. Tugas mereka dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tidak hanya terbatas pada pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga termasuk dalam upaya meratakan distribusi pendapatan. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang memberikan wewenang

kepada pemerintah daerah untuk mengelola serta mengatur pendapatan dan alokasi sumber daya dengan memilih pengutamakan kebutuhan untuk setiap daerah, sehingga diharapkan pemerintah daerah dapat mencapai tujuan meratakan pembagian penghasilan pendapatan. Berdasarkan Tabel 1.1 bisa diketahui bahwa Provinsi Jambi adalah salah satu provinsi di pulau sumatera, bahwa nilai pertumbuhan ekonominya naik turun terlihat pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 4,69% dan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 sebesar -0,44% diakibatkan dampak pandemi kemudian pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,13% Selama periode tahun 2018-2022, laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jambi berkisar antara minus 0,44 persen hingga 4,69 persen. Pandemi Covid-19 telah mengubah arah dan tingkat pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Tabel berikut menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi dari tahun 2018 hingga 2022. dan pada Tabel 1.2 Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2022 tumbuh 5,13 persen, lebih tinggi dibanding capaian 2021 yang tumbuh sebesar 3,66 persen. tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, namun mengalami perlambatan dan bahkan berkontraksi, yang menyebabkan kondisi serupa juga dialami oleh perekonomian di Provinsi Jambi pada tahun 2020.

Berdasarkan data laju pertumbuhan PDRB ADHK provinsi jambi perekonomian provinsi jambi mengalami kenaikan 2,4 persen dari tahun 2020 ke tahun berikutnya 2021 dan Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2022 tumbuh 5,22 persen, lebih tinggi dibanding capaian 2021 yang tumbuh sebesar 3,69 persen. Hal ini juga ditulis oleh Radarjambi.co.id, (2022) Perekonomian Provinsi Jambi telah tumbuh sebesar 5,9 persen yang mengartikan pertumbuhan ekonomi jambi tertinggi kedua se sumatera. Dalam data BPS, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dilihat dari Year On Year (YoY) tumbuh positif dan membaik pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,22 persen. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi provinsi Jambi ini diantaranya Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jambi 2018-2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kerinci	4.93	4.23	3.81	3.89	4.43
Merangin	4.93	4.25	0.78	5.24	5.72
Sarolangun	4.8	4.26	-0.25	6.61	6.73
Batanghari	4.83	5.07	-0.43	4.85	12.27
Muaro Jambi	5.01	4.79	0.35	4.06	7.97
Tanjung Jabung Timur	2.94	4.21	-3.44	0.14	0.57
Tanjung Jabung Barat	6.77	5.01	-0.29	1.36	2.56
Tebo	4.98	4.76	-0.03	4.30	6.30
Bungo	4.65	4.19	-0.48	4.99	4.73
Kota Jambi	5.30	4.73	-4.24	4.08	5.36
Sungai Penuh	4.88	5.01	-0.16	3.67	4.45

Sumber : BPS Provinsi Jambi, (2023)

Laju pertumbuhan tertinggi tahun 2022 dipegang oleh Kabupaten Batanghari sebesar 12,27 persen. Sedangkan laju pertumbuhan terendah terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (0,14 persen). Kisaran laju pertumbuhan kabupaten/kota pada tahun 2021 lebih baik dibandingkan tahun 2020. Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah dua Kabupaten yang memberikan kontribusi terbesar dalam kategori pertambangan di Provinsi Jambi. Kedua Kabupaten ini memiliki produksi minyak bumi, gas, dan batu bara yang melimpah. Sementara itu, dalam kategori perdagangan, Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Bungo merupakan penyumbang utama dalam Provinsi Jambi (BPS Provinsi Jambi 2019). Sedangkan menurut (jambiklik.id) Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi mencapai 5,77%, angka yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,22%. Di sisi lain, tingkat pertumbuhan ekonomi di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi pada tahun 2021 mengalami fluktuasi. Kabupaten Sarolangun mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 6,61% dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Kemudian, Kabupaten Bungo mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12%, Merangin 5,09%, diikuti oleh Kabupaten Batanghari dengan angka 4,47%. Kabupaten Tebo mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 4,32% dan Kerinci sebesar 4,16%. Selanjutnya, Kabupaten Muaro Jambi mencatatkan

pertumbuhan ekonomi sebesar 4,08%, Kota Jambi sebesar 3,94%, Sungai Penuh sebesar 3,65%, dan Tanjung Jabung Barat sebesar 1,36%. Di sisi lain, Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi terendah, hanya mencapai angka 0,13%. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara umum akan mendorong pertumbuhan rumah tangga, yang pada gilirannya akan menciptakan peluang bisnis baru. Dalam situasi tersebut, warga yang sebelumnya termasuk dalam kategori miskin akan memiliki kesempatan untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan yang akan membantu mereka keluar dari kategori miskin. Akibatnya, persentase penduduk miskin akan menurun, yang pada akhirnya akan mengurangi kesenjangan pengeluaran yang ada. Menurut penjelasan yang terdapat dalam buku ekonomi pembangunan, terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran. Apabila terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka secara ideal persentase penduduk miskin dan tingkat ketimpangan pengeluaran akan mengalami penurunan (Todaro dan Smith, 2011).

Ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah suatu fenomena yang umum terjadi dalam aktivitas ekonomi suatu daerah, yang timbul akibat perbedaan kondisi demografi dan sumber daya alam di setiap wilayah. Dampak dari perbedaan ini adalah perbedaan kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan ekonomi. Ketimpangan antar wilayah ini memiliki konsekuensi terhadap kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah, serta mempengaruhi formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Masalah ketimpangan regional sering muncul di Indonesia. Ketimpangan ini dapat diamati melalui perbedaan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara berbagai wilayah di Indonesia.

Provinsi Jambi adalah salah satu contoh provinsi di Indonesia yang mengalami ketimpangan regional yang signifikan. Perbedaan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan IPM antara kabupaten/kota di Provinsi Jambi menjadi bukti yang nyata mengenai hal tersebut. Ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antar wilayah tetap menjadi tantangan yang harus diatasi dalam upaya pembangunan di masa depan. Kesenjangan pembangunan antar wilayah memiliki potensi dampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam jangka panjang. Selain itu, terdapat juga kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Penting

untuk secara serius menangani ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antara kota dan desa, serta antara kota-kota, guna mencegah urbanisasi yang dapat menimbulkan masalah dan beban sosial di kawasan perkotaan. Ketimpangan ini terkait dengan ketidakseimbangan sebaran demografi dan keterbatasan infrastruktur yang memadai. Diperlukan upaya pembangunan yang lebih berfokus pada kawasan yang tertinggal sebagai kewajiban dalam menindaklanjuti tantangan ketimpangan maupun kesenjangan pembangunan.

Tabel 1.3 Ketimpangan (Gini Rasio) 10 Provinsi di Pulau Sumatera 2018-2022

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	0.318	0.319	0.323	0.323	0.291
Sumatera Utara	0.311	0.317	0.316	0.313	0.326
Sumatera Barat	0.305	0.306	0.305	0.300	0.292
Riau	0.347	0.334	0.329	0.327	0.323
Kepulauan Riau	0.339	0.341	0.339	0.339	0.325
Jambi	0.335	0.321	0.320	0.315	0.335
Sumatera Selatan	0.341	0.331	0.339	0.340	0.330
Kepulauan Bangka Belitung	0.272	0.269	0.262	0.247	0.255
Bengkulu	0.335	0.340	0.334	0.321	0.315
Lampung	0.326	0.329	0.327	0.314	0.313

Sumber : Badan Pusat Statistik (2023)

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2018 Provinsi Jambi mencatatkan rasio gini sebesar 0.335 dan pada tahun berikutnya 2019 sebesar 0.321, 2020 sebesar 0.320, dan 2021 sebesar 0.315 dan mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2022 sebesar 0.335 sekaligus menjadikan Provinsi Jambi dengan tingkat ketimpangan tertinggi pada tahun tersebut dibandingkan sembilan provinsi lainnya hal ini menunjukkan bahwa kondisi ketimpangan di Provinsi Jambi fluktuatif namun meningkat. Situasi ini menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sambil memperhatikan distribusi pendapatan yang lebih merata, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Menurut (Kompas.id) di Provinsi Jambi Rasio Gini memiliki angka yang paling tinggi pada tahun 2022 diantara provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. Ini berarti

terdapat ketimpangan yang signifikan antara individu yang kaya yang semakin menjadi lebih kaya dan individu yang miskin yang semakin menjadi lebih miskin. Sedangkan menurut BPS Provinsi Jambisejak 2018 cenderung stagnan di 0,334 - 0,335. Selanjutnya secara umum cenderung menurun hingga 2020, namun setelah itu cenderung fluktuatif sampai tahun 2022. Tetapi untuk di tahun 2022 Gini Rasio provinsi jambi menjadi yang tertinggi di pulau sumatera. Tingkat ketimpangan ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat ketimpangan nasional dan telah memenuhi sasaran indikator pembangunan tahun 2022.

Tabel 1.4 Ketimpangan (Gini Rasio) 11 Kab/Kota di Provinsi Jambi 2018-2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kerinci	0.32	0.29	0.28	0.28	0.28
Merangin	0.35	0.31	0.32	0.29	0.35
Sarolangun	0.29	0.27	0.31	0.32	0.30
Batanghari	0.30	0.31	0.32	0.31	0.29
Muaro Jambi	0.31	0.29	0.28	0.32	0.27
Tanjung Jabung Timur	0.29	0.29	0.25	0.25	0.27
Tanjung Jabung Barat	0.36	0.28	0.28	0.25	0.26
Tebo	0.31	0.26	0.30	0.30	0.30
Bungo	0.32	0.33	0.31	0.30	0.32
Kota Jambi	0.33	0.34	0.34	0.35	0.36
Sungai Penuh	0.30	0.33	0.31	0.31	0.29

Sumber : Badan Pusat Statistik (2023)

Ketimpangan pendapatan tidak hanya terjadi antara provinsi atau negara, tetapi juga antara kabupaten/kota. Di Provinsi Jambi, terdapat tingkat ketimpangan pendapatan yang cukup mengkhawatirkan antara kabupaten/kota. Provinsi Jambi terdiri dari 9 Kabupaten dan 2 Kota, masing-masing dengan perbedaan latar belakang wilayahnya. Perkembangan Gini Rasio di setiap kabupaten/kota masih terjaga pada angka yang relatif rendah, terutama Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimana Gini Rasionya merupakan yang paling rendah dari tahun 2018 sampai tahun 2022 dibanding kabupaten/kota lain di Provinsi Jambi, Kota Jambi menunjukkan peningkatan Gini Rasio pada tahun 2022 atau mengalami peningkatan ketimpangan pendapatan.

Salah satu cara umum untuk mengevaluasi ketimpangan ekonomi di suatu wilayah adalah melihat bagaimana pendapatan individu didistribusikan. Ketika melakukan pembangunan ekonomi, tidak bisa mengabaikan isu-isu yang terkait, termasuk salah satunya adalah masalah ketimpangan pendapatan pada antar wilayah. Kenaikan pada pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan dan sebaliknya penurunan pada pertumbuhan ekonomi akan menaikkan tingkat ketimpangan pendapatan. Ketimpangan merupakan fenomena yang sering terjadi dalam perekonomian suatu daerah. Ketimpangan tersebut disebabkan oleh perbedaan dalam sumber daya alam dan kondisi demografi di setiap daerah. Dampaknya, terdapat perbedaan tingkat kemajuan antara wilayah yang berkembang dan wilayah yang tertinggal di setiap wilayah. Secara teoritis diungkapkan oleh Douglas C North memunculkan ketimpangan antar wilayah dalam analisisnya tentang teori pertumbuhan Neo Klasik. Dalam teori ini dimunculkan sebuah prediksi hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini lebih dikenal dengan *Hipotesa Neo-Klasik* (Sjafrizal, 2008).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memilih variabel yang menjadi fokus utama atau dependen dalam penelitian ini. Variabel tersebut adalah ketimpangan regional Kabupaten/Kota Provinsi Jambi yang diukur melalui Indeks Gini, sementara itu variabel independen yang digunakan adalah, kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, PDRB Atas Harga Konstan dan Indeks Pembangunan Manusia. Judul yang penulis terapkan dalam penelitian yaitu “Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Regional Di Provinsi Jambi”.

1.1. Rumusan Masalah

Hasil dari pembahasan latar belakang diatas dapat diambil kesimpulan untuk rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan regional di Provinsi Jambi.
2. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap ketimpangan regional di Provinsi Jambi.
3. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap ketimpangan regional di Provinsi Jambi.
4. Bagaimana pengaruh IPM terhadap ketimpangan regional di Provinsi Jambi.

1.2. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan regional di Provinsi Jambi.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengangguran terhadap ketimpangan regional di Provinsi Jambi.
3. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap ketimpangan regional di Provinsi Jambi.
4. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan regional di Provinsi Jambi.

1.3. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis selanjutnya, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi para peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan fokus yang serupa.
2. Bagi peneliti, penting untuk mendapatkan pemahaman tentang permasalahan yang sering muncul di lapangan, karena terkadang tantangan yang dihadapi di lapangan dapat berbeda dengan apa yang dipelajari dalam teori-teori perkuliahan.
3. Bagi instansi diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang berguna sebagai pertimbangan dalam pembuatan regulasi regional, terutama bagi pemerintah daerah yang menjadi objek penelitian oleh penulis

1.4. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab diantaranya mencakup bab-bab berikut ini :

Bab I: Pendahuluan

Bab pertama dari penelitian ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan landasan penelitian, identifikasi masalah yang diteliti, batasan masalah yang relevan, serta rumusan masalah yang menjelaskan fokus penelitian. Selain itu, bab tersebut mencakup tujuan penelitian dan urutan sistematikanya.

Bab II: Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Pada bab ini, disajikan rangkuman penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan untuk memperkuat dasar teoritis yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bab berikutnya. Bab ini harus menyediakan analisis menyeluruh mengenai hubungan antara variabel yang menjadi objek penelitian. Temuan dari analisis tersebut harus dijadikan dasar untuk merumuskan kesimpulan yang akan membimbing pembentukan hipotesis penelitian yang akan digunakan.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode analisis yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis dan sumber data yang dikumpulkan serta definisi variabel operasional yang digunakan.

Bab IV: Hasil Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini, dijelaskan proses pengolahan setiap variabel yang digunakan dengan menerapkan metode yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selanjutnya, hasil analisis data yang diperoleh akan diinterpretasikan dan dijelaskan secara mendetail.

Bab V: Simpulan dan Implikasi

Setiap bagian ini memiliki kemampuan untuk memberikan penjelasan terhadap jawaban dari permasalahan penelitian dan pencapaian tujuan penelitian, serta memberikan implikasi teoritis dan rekomendasi kebijakan yang seharusnya diimplementasikan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Zusanti et al, (2020) yang menganalisis pengaruh ipm, pertumbuhan ekonomi dan tpt terhadap ketimpangan wilayah di pulau jawa 2010-2018. Penelitian ini menggunakan analisis linear berganda yaitu *random effect models*. Dengan hasil analisis menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Jawa, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Jawa, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (IPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Jawa.

Penelitian yang dilakukan oleh Yoertiara dan Feriyanto, (2022) yang menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan provinsi-provinsi di pulau Jawa 2012-2021. Penelitian ini menggunakan analisis linear berganda yaitu *fixed effect models*. Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dan negatif dari variabel indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi pulau jawa. Sementara itu, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi pulau jawa, namun tingkat pengangguran terbuka menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi pulau jawa

Penelitian yang dilakukan oleh Lala et al, (2023) yang menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat ketimpangan pendapatan (studi pada kota-kota di provinsi sulawesi utara 2011-2021). Penelitian ini menggunakan analisis linear berganda yaitu *fixed effect model*. Dengan hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan dan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan kota-kota di Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2011

sampai 2021 dan variabel indeks pembangunan manusia menunjukkan berpengaruh signifikan dan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan kota-kota di Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2011 sampai 2021.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Farhan dan Sugianto, (2022) menganalisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan di pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan analisis linear berganda yaitu *fixed effect models*. Dengan hasil analisis menunjukkan bahwa Variabel pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa, Variabel kemiskinan memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Dan variabel indeks pembangunan manusia (IPM) memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Astuti dan Hukom, (2023) Penelitian ini mengkaji dampak PDRB, IPM, dan tenaga kerja terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kalimantan Tengah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model efek tetap (*fixed effect models*) dalam model analisis berganda. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa ketimpangan di Kalimantan Tengah dipengaruhi secara negatif oleh variabel produk domestik regional bruto (PDRB), namun pengaruhnya masih dalam tingkat yang masih bisa diatasi. Selain itu, ketimpangan pendapatan di Kalimantan Tengah juga dipengaruhi secara positif dengan tingkat yang tergolong marginal oleh variabel indeks pembangunan manusia (IPM). Selain itu tenaga kerja juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kalimantan Tengah.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma et al, (2019) yang menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), inflasi dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di daerah istimewa Yogyakarta tahun 2011-2017. Penelitian ini menggunakan analisis linear berganda yaitu *fixed effect models*. Dengan hasil analisis menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto (PDRB) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan D.I Yogyakarta selama periode 2011-2017. Sementara itu, inflasi menunjukkan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut selama periode yang

sama. Lebih lanjut, kondisi inflasi D.I Yogyakarta juga turut di pertimbangkan. Selain itu indeks pembangunan manusia (IPM) juga menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta selama periode tersebut

Penelitian yang dilakukan oleh Hariani, (2019) yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur tahun 2012-2015. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yaitu REM (*random effect model*). Dengan hasil analisis menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan. Pengaruh tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) terhadap ketimpangan pendapatan di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur tidak signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewanto & Rahmawati, (2021) yang menganalisis studi tentang ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah di wilayah barat dan timur Indonesia pada periode tahun 2014 sampai 2018. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks Williamson untuk menganalisis ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam 34 provinsi di Indonesia, variabel indeks pembangunan manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Di sisi lain variabel kemiskinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di 34 provinsi tersebut, selain itu variabel produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di 34 provinsi di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Hindun et al, (2019) yang menganalisis Pengaruh pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model analisis linear berganda yaitu *random effect models*. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Variabel pengangguran menunjukkan tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Selanjutnya secara parsial, terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kemiskinan terhadap ketimpangan

pendapatan. Dalam pengujian, ditemukan hubungan antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan bersifat positif.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ersad et al, (2022) yang menganalisis dampak IPM, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera bagian selatan. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda yaitu *fixed effect models*. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan regresi data panel menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di wilayah Sumatera bagian selatan.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Arafah dan Khoirudin, (2022) yang menganalisis ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yaitu *fixed effect models*. Dengan hasil analisis Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Bali. Pendidikan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Indeks pembangunan manusia (IPM) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi Bali sedangkan pertumbuhan ekonomi juga tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan baik secara simultan maupun parsial, menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar daerah di provinsi Bali. Selain itu, jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi Bali.

Penelitian yang dilakukan oleh Hartati, (2022) yang menganalisis Analisis Ketimpangan Ekonomi Di Provinsi Papua. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan penerapan rumus perhitungan Rasio Gini atau Indeks Gini sesuai dengan BPS. Berdasarkan hasil analisis penelitian, ditemukan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk di Provinsi Papua selama 5 tahun terakhir (2017-2021) mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2017 dan 2018 dengan nilai sebesar 0.398. Pada tahun 2017, Gini Ratio tertinggi di perkotaan adalah 0,322, sedangkan Gini Ratio tertinggi di pedesaan

terjadi pada tahun 2021 dengan nilai 0,422. Ketika mengamati Distribusi Pengeluaran Kelompok 40% Terbawah, perkotaan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2021 sebesar 21,65, sementara di pedesaan nilai tertinggi tercatat pada tahun 2018 sebesar 16,00. Secara keseluruhan, selama periode Maret 2017 hingga Maret 2018, Gini Ratio Provinsi Papua menunjukkan tren yang menurun. Namun, pada bulan September 2018, terjadi peningkatan yang signifikan dan kemudian tingkat ketimpangan cenderung stagnan hingga Maret 2021. Pada bulan Maret 2021, Gini Ratio Provinsi Papua mencapai angka 0,397.

Penelitian yang dilakukan oleh Safitri et al, (2021) yang menganalisis Analisis disparitas pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (segi ekonomi dan non ekonomi). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif naratif dengan menggunakan data sekunder dikarenakan penelitian ini bersifat menggambarkan, menghitung, menguraikan, serta menarasikan dalam bentuk naskah hasil penelitian tersebut, Metode analisis regresi berganda menggunakan data panel digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan. Namun, dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap ketimpangan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, begitu pula dengan investasi yang berpengaruh terhadap ketimpangan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, sedangkan indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh terhadap ketimpangan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, Tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, Kemiskinan tidak berpengaruh terhadap ketimpangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Ketimpangan Regional (Gini Rasio)

Ketimpangan regional mengacu pada ketidakseimbangan dalam kemajuan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan distribusi kekayaan di antara berbagai wilayah dalam suatu negara atau wilayah geografis tertentu. Ketidakseimbangan ini dapat diamati

dalam berbagai hal, seperti pendapatan per orang, akses ke layanan publik, peluang kerja, fasilitas infrastruktur, sistem pendidikan, dan juga aspek kesehatan. Berdasarkan Hipotesis Neo-Klasik, di awal proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Fenomena ini akan berlangsung hingga mencapai puncaknya. Namun, jika proses pembangunan terus berlanjut, maka secara bertahap ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan mengalami penurunan. (Zasriati, 2022). Maka dari itu fokus penelitian tersebut lebih mengarah kepada ketimpangan Gini Rasio yang diukur melalui pendapatan di suatu wilayah

Indeks Gini, Rasio Gini atau koefisien Gini adalah salah satu parameter yang digunakan untuk menilai tingkat kesenjangan distribusi ekonomi secara keseluruhan. Saat pendapatan yang diterima oleh penduduk atau masyarakat dalam suatu daerah tidak terbagi secara adil, maka itu menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan. Indeks Gini diwakili dalam bentuk angka yang berkisar antara 0 hingga 1. Apabila Indeks Gini memiliki nilai 0, itu menandakan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, sedangkan jika nilainya adalah 1, menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang sempurna. Rasio Gini atau koefisien merupakan suatu metode untuk mengukur sejauh mana ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan penduduk. Indeks Gini mengambil dasar dari kurva Lorenz, Grafik pengeluaran kumulatif digunakan untuk membandingkan distribusi suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi seragam yang mencerminkan persentase penduduk secara kumulatif. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan akan semakin menurun ketika nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, ketimpangan pendapatan akan semakin meningkat ketika nilai Koefisien Gini mendekati satu.

Tabel 2.1 Perhitungan Gini Rasio

Nilai koefisien	Distribusi Pendapatan
<0,4	Tingkat ketimpangan rendah
0,4-0,5	Tingkat ketimpangan sedang
>0,5	Tingkat ketimpangan tinggi

Sumber : Hartati, (2022)

Penggunaan Indeks Gini memberikan bantuan kepada pemerintah dalam menganalisis tingkat kemampuan ekonomi masyarakat, karena menjadi sebuah indikator untuk mengukur tingkat keadilan dalam suatu negara. Berdasarkan rumus yang dijabarkan oleh BPS, (2023) Perhitungan nilai Rasio Gini atau Indeks Gini dilakukan dengan cara berikut.

Keterangan : $GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$

GR = Koefisien Gini

F_{pi} = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

FC_i = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

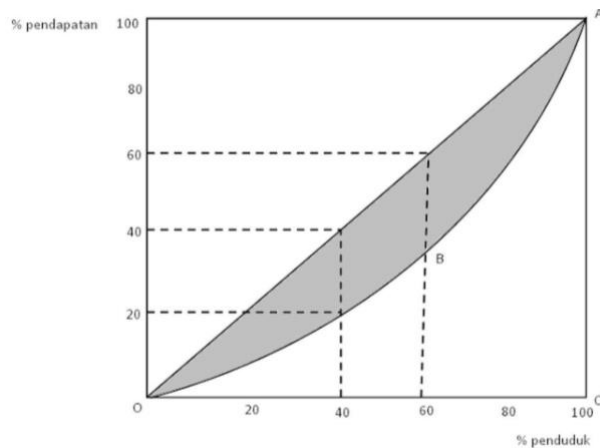
FC_{i-1} = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i -1)

Indeks Gini (GR) memiliki rentang nilai dari nol hingga satu. Jika nilai Indeks Gini (GR) sama dengan 0, maka dapat diartikan bahwa terdapat kesetaraan pendapatan yang sempurna. Ini berarti setiap individu menerima pendapatan yang sama dengan individu lainnya. Di sisi lain, jika nilai Indeks Gini (GR) adalah 1, dapat disimpulkan bahwa terjadi ketimpangan pendapatan yang sangat tinggi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan Indeks Gini di suatu negara. Dasar konseptual dalam menghitung Indeks Gini pada dasarnya melibatkan upaya untuk mengukur luas kurva yang menggambarkan distribusi pendapatan di berbagai kelompok pendapatan. Perhitungan Indeks Gini memerlukan penggunaan kurva Lorenz. Secara umum, kurva Lorenz digunakan sebagai representasi visual untuk menggambarkan tingkat ketimpangan yang ada dalam distribusi pendapatan masyarakat.

Kurva Lorenz sering digunakan untuk mengilustrasikan atau menggambarkan tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan masyarakat. Kurva Lorenz merupakan grafik yang menampilkan pengeluaran kumulatif untuk membandingkan distribusi suatu variabel tertentu, seperti pendapatan, dengan distribusi seragam yang mencerminkan persentase kumulatif penduduk. Untuk menghitung Indeks Gini, grafik tersebut menggambarkan persentase kumulatif penduduk (mulai dari yang paling miskin hingga

yang terkaya) pada sumbu horizontal, sementara itu persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambarkan pada sumbu vertikal (lihat Gambar 2.1 di bawah - Kurva Lorenz). Semakin dekat kurva tersebut dengan garis diagonal, menunjukkan tingkat ketimpangan yang lebih rendah, sedangkan semakin jauh kurva tersebut dari garis diagonal menunjukkan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi.

Gambar 2.1 Kurva Lorenz



Sumber : Badan Pusat Statistik 2022

Pada gambar yang disajikan, sumbu horizontal menggambarkan persentase penduduk secara kumulatif, sementara sumbu vertikal menggambarkan persentase total pendapatan yang diterima oleh setiap persentase masyarakat atau penduduk. Terdapat garis diagonal yang disebut "garis pemerataan sempurna" yang berada di tengah grafik. Setiap titik yang berada pada garis diagonal tersebut menunjukkan situasi di mana persentase penduduk sama dengan persentase pendapatan. Jarak antara kurva Lorenz dan garis diagonal mengindikasikan tingkat ketimpangan. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat ketimpangan. Sebaliknya, semakin dekat kurva Lorenz dengan garis diagonal, semakin merata distribusi pendapatan (Robert dan Brown, 2004)

Ketimpangan indeks gini juga memiliki dampak yang negatif bagi masyarakat sendiri yaitu ketidakadilan sosial antara kaya dan miskin juga dapat menyebabkan konflik

bagi masyarakat, dapat menyebabkan kemiskinan di masyarakat. Hal ini dikarenakan pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan sebagian masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, serta dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi di suatu negara. Hal ini dikarenakan ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam permintaan dan penawaran di pasar.

2.2.2. Kemiskinan

Okuputra dan Nasikh (2022), Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana seseorang atau kelompok tidak memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Kemiskinan dapat terjadi karena berbagai faktor seperti rendahnya pendapatan, kurangnya akses terhadap pekerjaan, dan kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan. Berbagai definisi kemiskinan telah diajukan oleh para ahli, namun secara umum disepakati bahwa kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki atau berada jauh dari kesejahteraan atau kesejahteraan (well-being, welfare).

kuncoro, (2006) kemiskinan merujuk pada ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan minimum. Maipita juga pernah mencatat pernyataan Chambers yang menegaskan bahwa pemahaman tentang kemiskinan dapat bervariasi tergantung pada perspektif, pemahaman, dan tanggapan individu yang mengajukan pertanyaan tentang fenomena kemiskinan tersebut. Kemiskinan telah menjadi isu yang sangat penting selama ini karena melibatkan berbagai dimensi. Pengertian kemiskinan tidak lagi terbatas pada kurangnya kemampuan ekonomi saja, tetapi juga mencakup kegagalan dalam memenuhi hak-hak yang seharusnya. Dalam banyak kasus, ada interaksi timbal balik antara penyebab dan dampak kemiskinan, yang berarti bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi miskin juga menciptakan kondisi yang mempertahankan keadaan kemiskinan tersebut. Kemiskinan memiliki kemampuan sebagai hambatan bagi pembangunan ke depan dan dapat mempengaruhi upaya mencapai pembangunan berkelanjutan.

Pemberantasan kemiskinan merupakan suatu tantangan terbesar bagi seluruh dunia pada saat ini.

kuncoro, (2006) mengemukakan bahwa secara mendasar, definisi kemiskinan dapat dipandang dari dua perspektif, yaitu:

1. Kemiskinan Mutlak/Absolut Kemiskinan sering dikaitkan dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Umumnya, kebutuhan tersebut terbatas pada kebutuhan dasar minimum yang diperlukan agar seseorang dapat hidup secara layak. Jika pendapatan seseorang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, maka orang tersebut dianggap sebagai miskin. Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan membandingkan pendapatan individu dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Kemiskinan Relatif Kemiskinan relatif merujuk pada kondisi di mana individu atau kelompok memiliki pendapatan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pendapatan dalam masyarakat atau kelompok lainnya. Kemiskinan terkait dengan permasalahan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Ketika pendapatan seseorang mencapai batas minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi tetap jauh lebih rendah daripada pendapatan rata-rata di masyarakat sekitarnya, maka individu tersebut diklasifikasikan sebagai miskin.

Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah kemiskinan, termasuk dalam meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta meningkatkan akses terhadap sumber daya alam. Selain itu, tindakan seperti memberikan bantuan sosial dan memperkuat perekonomian lokal juga dapat dilakukan guna mengurangi tingkat kemiskinan.

2.2.3. Pengangguran (TPT)

Yanuar (2009), menjelaskan bahwa pengangguran terjadi ketika individu yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memiliki pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya. Definisi angkatan kerja menurut Badan Pusat Statistik mengacu pada

jumlah penduduk yang berusia di atas 15 tahun yang sedang bekerja atau tidak bekerja. Dalam konteks ekonomi mikro, pengangguran merujuk pada individu yang memiliki kemampuan untuk bekerja dan melakukan pekerjaan tetapi saat itu tidak memiliki pekerjaan. Fokus penelitian ini adalah pada tingkat pengangguran terbuka.

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase dari jumlah pengangguran dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang sedang bekerja, memiliki pekerjaan sementara tidak bekerja, serta penduduk yang menganggur. Menurut sumber Badan Pusat Statistika (2022), terdapat beberapa kategori pengangguran yang dapat diklasifikasikan, yaitu: Pertama, individu yang secara aktif mencari pekerjaan. Kedua, individu yang sedang mempersiapkan diri untuk usaha atau pekerjaan baru. Ketiga, individu yang tidak mencari pekerjaan karena mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Keempat, kelompok individu yang tidak aktif mencari pekerjaan karena mereka sudah memiliki pekerjaan tetapi belum memulai bekerja. Berdasarkan data yang tersedia dari Badan Pusat Statistik, pengangguran mengacu pada individu atau penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari dan pada saat yang bersamaan sedang aktif mencari pekerjaan atau memulai usaha lain, atau individu yang tidak mencari pekerjaan karena belum dianggap memiliki pekerjaan. Pengangguran dapat dianggap sebagai salah satu permasalahan di bidang ekonomi makro yang secara langsung mempengaruhi individu, dan memiliki potensi untuk memberikan dampak negatif secara langsung terhadap individu tersebut.

Menurut penjelasan dari Nurrahmah et al (2020) tingkat pengangguran terbuka merujuk pada persentase individu yang sedang menganggur dibandingkan dengan jumlah total angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup populasi individu yang berusia 15 tahun atau lebih yang sedang bekerja, memiliki pekerjaan tetapi sedang tidak bekerja secara sementara, serta individu yang sedang menganggur. Pengangguran terbuka juga bisa terjadi karena adanya penurunan aktivitas ekonomi, kemajuan teknologi mekanis yang mengurangi permintaan tenaga kerja, atau stagnasi dalam perkembangan suatu industri. Adapun dibawah ini merupakan cara perhitungan Tingkat Pengangguran Terbuka, Keterangan sebagai berikut :

$$\text{TPT} = \text{PP} : \text{PAK} \times 100\%$$

TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka

PP : Jumlah Pengangguran (orang)

PAK : Jumlah Angkatan Kerja (orang)

Secara umum, tingkat pengangguran terbuka (TPT) cenderung lebih tinggi di kalangan penduduk usia muda yang baru memasuki angkatan kerja. Ini terjadi karena kenyataan bahwa mereka termasuk dalam kelompok angkatan kerja yang baru saja menyelesaikan pendidikan, baik itu pendidikan formal selama 12 tahun maupun pendidikan tingkat lanjutan seperti perguruan tinggi. Secara umum, mereka aktif mencari peluang pekerjaan yang sesuai dengan tujuan mereka setelah lulus atau menyelesaikan sekolah. Mereka biasanya memiliki tujuan untuk bekerja di lokasi yang maju atau di sektor pekerjaan yang menawarkan stabilitas jangka panjang. Mungkin mereka berupaya mencari pekerjaan di perkotaan atau di daerah yang mengalami kemajuan teknologi mekanis. Akibatnya, tingkat pengangguran cenderung tinggi di wilayah perkotaan. Tingkat pengangguran ini terjadi ketika pertumbuhan jumlah peluang kerja tidak sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang aktif mencari pekerjaan. Hal ini mengakibatkan peningkatan jumlah pekerja dalam perekonomian yang kesulitan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Keadaan ini berlangsung dalam periode yang panjang, di mana mereka tetap menganggur tanpa pekerjaan. Mereka termasuk dalam kategori pengangguran terbuka atau pengangguran deklaratif. Pengangguran terbuka juga dapat disebabkan oleh penurunan kegiatan ekonomi, perkembangan teknologi yang mengurangi kesempatan kerja, atau penurunan pertumbuhan di sektor industri tertentu.

2.2.4. Produk domestik bruto (PDRB)

Definisi PDRB mirip dengan PDB, yakni merupakan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Di Indonesia, perhitungan PDRB dapat dibedakan menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan produksi dengan menggunakan konsep Nilai Tambah.

Mankiw, (2018) Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah keseluruhan produksi akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah adalah nilai yang meningkat akibat penggabungan faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Perhitungan nilai tambah melibatkan pengurangan biaya antara dari nilai produksi atau output. Nilai tambah bruto mencakup pendapatan faktor (seperti upah, gaji, bunga, sewa tanah, dan laba), akumulasi penyusutan, serta pajak tak langsung neto. Dengan demikian, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dapat diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari setiap sektor dan menjumlahkannya dari semua sektor berdasarkan harga pasar.

Menurut Tarigan, (2005) produk domestik bruto (PDRB) ialah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang muncul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu alat data ekonomi yang berguna untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota. (Badan Pusat statistika 2022), Data ini juga dapat digunakan untuk tujuan dan kepentingan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi untuk merumuskan kebijakan, mengukur tingkat percepatan peredaran uang (*velocity of money*), menganalisis kedalaman sektor keuangan (*financial deepening*), menentukan pajak, melakukan studi ekspor dan impor, dan lain sebagainya. Pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan, yang disajikan berdasarkan harga berlaku dan harga konstan (sebagai dasar referensi). Produk domestik regional bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku, juga dikenal sebagai PDRB nominal, disusun dengan mempertimbangkan harga yang berlaku pada periode perhitungan, dan bertujuan untuk menganalisis struktur perekonomian. Di sisi lain, produk domestik regional bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan (sebagai dasar referensi) disusun dengan mempertimbangkan harga pada tahun dasar, dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

1. Pendekatan produksi

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan total nilai dari barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah atau region dalam periode waktu tertentu, umumnya dalam setahun.

2. Pendekatan pengeluaran

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan total dari semua pengeluaran yang meliputi konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang non-profit, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, dan ekspor neto di suatu wilayah atau region dalam periode tertentu, umumnya dalam setahun.

3. Pendekatan pendapatan

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah total balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang terlibat dalam proses produksi di suatu wilayah atau region dalam periode waktu tertentu, umumnya dalam setahun.

Tiga pendekatan yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan metode yang digunakan secara langsung untuk menghitung nilai-nilai PDRB.

2.2.5. Indeks pembangunan manusia (IPM)

IPM memberikan gambaran tentang kondisi kesejahteraan dan kemajuan sosial-ekonomi masyarakat dalam suatu negara. IPM membantu dalam membandingkan kinerja pembangunan antara negara-negara dan mengidentifikasi area dimana perbaikan dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Menurut Arsyad, (2015) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks gabungan berdasarkan pada tiga indikator yaitu pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemajuan sosial dan ekonomi dalam suatu wilayah atau negara dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita yang sebenarnya. IPM digunakan untuk menentukan apakah suatu negara atau wilayah termasuk dalam kategori maju, berkembang, atau tertinggal. Selain itu, IPM juga berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi pengaruh dan dampak kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM berperan sebagai salah satu pengukuran untuk menilai sejauh

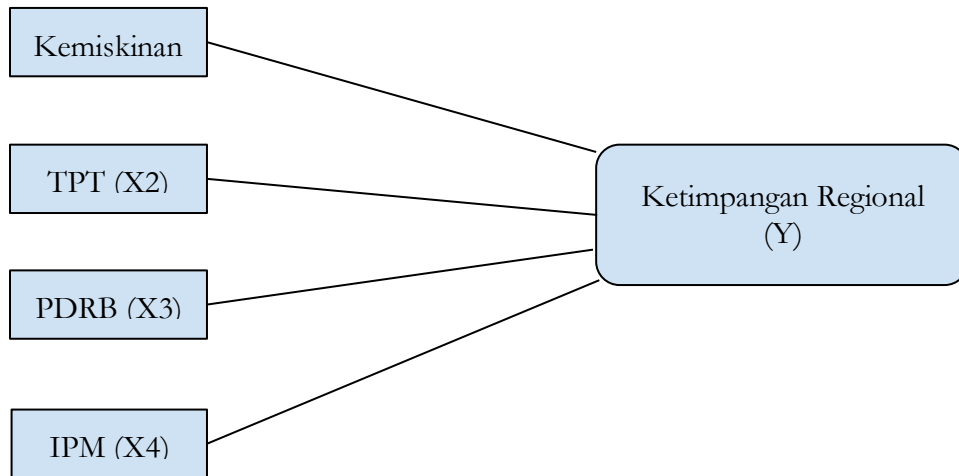
mana pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Melalui pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dapat didorong. Pada dasarnya, IPM terdiri dari empat elemen kunci, yaitu produktivitas, distribusi yang merata, keberlanjutan, dan pemberdayaan. Dengan meningkatkan keempat elemen tersebut, tujuan pembangunan manusia dapat tercapai.

Pada indeks pembangunan manusia (IPM) yang dikembangkan oleh UNDP, terdapat empat kategori yaitu; Pertama tingkat rendah terjadi ketika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu negara atau wilayah memiliki nilai kurang dari 50. Kedua tingkat menengah ke bawah terjadi ketika IPM suatu negara atau wilayah berada dalam rentang antara 50 hingga kurang dari 66. Ketiga tingkat menengah ke atas terjadi ketika IPM suatu negara atau wilayah berada dalam rentang antara 66 hingga kurang dari 80. Keempat Tingkat tinggi terjadi ketika IPM suatu negara atau wilayah memiliki nilai lebih dari 80. Feriyanto, (2014) mengungkapkan bahwa pembangunan manusia mencakup empat inti aspek, yaitu produktivitas, pemerataan, kelangsungan, dan pemberdayaan. Kemajuan pembangunan manusia dapat diukur dari kemampuan yang optimal dalam menggariskan keempat aspek inti ini, dengan manusia berperan sebagai agen pembangunan yang efisien.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah konstruksi konseptual yang digunakan untuk memandu pemikiran, analisis, dan penyelidikan terhadap suatu topik. Kerangka pemikiran membantu mengorganisir ide-ide, konsep-konsep, teori-teori, dan variabel-variabel yang relevan dalam konteks penelitian atau analisis tertentu.

Berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran maka hubungan antara variabel independen (bebas) dengan variabel dependen (terikat) adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis

Mengacu pada landasan dasar teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis-hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Diduga Kemiskinan berpengaruh positif terhadap ketimpangan regional di Provinsi Jambi.
2. Diduga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif terhadap ketimpangan regional di Provinsi Jambi.
3. Diduga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan regional di Provinsi Jambi.
4. Diduga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan regional di Provinsi Jambi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, digunakan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua dan umumnya sudah dalam bentuk yang siap digunakan (Widarjono, 2013). Dalam penelitian ini, digunakan data sekunder yang terdiri dari dua jenis, yaitu data cross-section yang melibatkan 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, dan data time-series yang mencakup periode 2011-2022. Sumber data penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat ketimpangan Regional (Gini Rasio), sedangkan variabel independennya meliputi Kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka (TPT). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3.2. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu :

a. Variabel dependen

Untuk mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia, BPS menggunakan data pengeluaran dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pengeluaran adalah Gini Rasio. Rentang nilai Gini Rasio berkisar antara 0 (nol) hingga 1 (satu). Semakin mendekati nilai 1, semakin tinggi tingkat ketimpangan yang terindikasikan. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ketimpangan (*Gini Ratio*). yaitu indeks total ketimpangan di Provinsi Jambi. Data yang digunakan merupakan indeks nilai ketimpangan Regional 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi dengan periode waktu 2011-2022. Data diperoleh dari BPS Kota Jambi dengan satuan indeks nilai angka

b. Variabel independen

- 1) Variabel Kemiskinan, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran dalam jangka waktu 1 tahun, dengan *Head Count Index* (HCI-P0) adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan. Kemiskinan menurut 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi dengan periode waktu 2011-2022. Data diperoleh dari BPS dengan satuan persen (%).
- 2) Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dalam jangka satu tahun. Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dengan periode waktu 2011-2022. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan satuan persen (%).
- 3) Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik. Dalam jangka 1 tahun. Data yang digunakan PDRB menurut 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi dengan periode waktu 2011-2022. Data diperoleh dari BPS dengan satuan Milyar/Rupiah (Rp).
- 4) Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM). memberikan penjelasan tentang bagaimana masyarakat dapat memperoleh akses terhadap hasil pembangunan dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan aspek lainnya dalam jangka 1 tahun. Data IPM menurut 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi dengan periode waktu 2011-2022. Data diperoleh dari BPS dengan satuan Persen (%).

3.3. Metode Analisis

Penelitian ini memakai metode regresi data panel, alat pengolah data yang digunakan Eviews 12. Dengan menggunakan data regresi data panel yang memiliki

karakteristik data *cross section* dan *time series*. Maka model persamaan dapat ditulis sebagai berikut :

Persamaan model :

$$\text{Ketimpangan Gini rasio}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Kemiskinan}_{it} + \beta_2 \text{TPT}_{it} + \beta_3 \text{PDRB}_{it} + \beta_4 \text{IPM}_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

Ketimpangan Regional (*Gini Ratio*) (%), Kemiskinan (%), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Milyar/Rupiah), Indeks Pembangunan Manusia (%). Dalam proses regresi memerlukan 3 (tiga) metode, yaitu :

3.3.1. Common Effect Models

Metode *Common Effect Models* adalah metode awal paling sederhana dalam proses estimasi data panel yang menggabungkan data *time series* dan data *cross section* dengan metode *ordinary least squares* (OLS). Dalam metode ini persamaan CEM dalam bentuk linier sebagai berikut :

$$\text{Ketimpangan Gini Rasio}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Kemiskinan}_{it} + \beta_2 \text{TPT}_{it} + \beta_3 \text{PDRB}_{it} + \beta_4 \text{IPM}_{it} + e_{it}$$

3.3.2. Fixed Effect Models

Metode dengan *fixed effect models* mengasumsikan bahwa koefisien regresi tidak berubah antar ruang dan waktu. *Fixed effect models* (FEM) menggunakan dummy penjelas perbedaan intersep. Dalam *model fixed effect*, juga diasumsikan bahwa terdapat hubungan regresi yang berbeda antara provinsi-provinsi dan waktu yang berbeda (Widarjono, 2013). Dalam estimasi *fixed effect models* (FEM) disebut juga dengan *least squares dummy variable* (LSDV). Persamaan FEM dalam bentuk linier sebagai berikut :

$$\text{Ketimpangan Gini rasio}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Kemiskinan}_{it} + \beta_2 \text{TPT}_{it} + \beta_3 \text{PDRB}_{it} + \beta_4 \text{IPM}_{it} + e_{it}$$

3.3.3. Random effect models

Dalam model ini, kemungkinan adanya korelasi antara variabel gangguan baik antar waktu maupun antar individu. Pada *Model Random Effect*, perbedaan intersep diperhitungkan melalui istilah kesalahan (*error terms*) pada setiap cross section. Salah satu keuntungan menggunakan *Model Random Effect* adalah kemampuannya dalam mengatasi *Heteroskedastisitas*. Model ini juga dikenal sebagai *Error Component Model* (ECM) atau teknik *Generalized Least Square* (GLS) (Widarjono, 2013). Metode estimasi yang menggunakan residual waktu dan individu yang saling berkaitan dan memiliki intersep berbeda pada setiap subjek. Persamaan *REM* dalam bentuk linier sebagai berikut :

$$\text{Ketimpangan Gini rasio}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Kemiskinan}_{it} + \beta_2 \text{TPT}_{it} + \beta_3 \text{PDRB}_{it} + \beta_4 \text{IPM}_{it} + e_{it}$$

Pemilihan model olah data:

Dengan 3 (tiga) jenis estimasi yang telah disebutkan diatas, untuk mengetahui model yang tepat untuk digunakan maka diperlukan uji pemilihan model dengan 2 pertimbangan yaitu :

3.3.4. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) digunakan untuk menentukan model yang paling baik antara *Common Effect Models* atau *Random effect Models*. Uji ini dikembangkan oleh Breusch-Pagan. Metode Breusch-Pagan digunakan untuk menguji signifikansi model *Random Effect* berdasarkan nilai residual yang diperoleh dari metode OLS (*Ordinary Least Squares*). Hipotesis uji LM sebagai berikut.

H_0 = Model Terbaik *Common Effect Models*

H_a = Model Terbaik *Random Effect Models*

Melalui nilai *P-value*, dapat diperoleh informasi mengenai tingkat signifikansi. Jika nilai *P-value* kurang dari 5% atau 10%, maka akan digunakan metode estimasi *Random Effect Models*. Namun, jika nilai *P-value* lebih besar dari 5% atau 10%, maka akan menggunakan metode estimasi *Common Effect Models*.

3.3.5. Uji Chow (Uji F-statistik)

Uji Chow metode yang digunakan dalam pertimbangan pemilihan model antara *common effect models* atau *fixed effect models*. Dengan asumsi:

H_0 = Menggunakan *Common Effect Models*

H_a = Menggunakan *Fixed Effect Models*

Berdasarkan nilai p-value jika diketahui signifikan dan hasil estimasi kurang dari 5% atau 10% maka dapat mengaplikasikan metode estimasi fixed effect models. Namun apa bila nilai p-value lebih dari 5% atau 10% maka dapat diketahui bahwa tidak signifikan dan metode estimasi menggunakan common effect models.

3.3.6. Uji Hausman

Uji hausman metode dalam memilih antara model *fixed effect models* atau *random effect models*. Dengan asumsi :

H_0 = Menggunakan *Fixed Effect Models*

H_a = Menggunakan *Random Effect Models*

Dengan nilai *p-value* dapat diketahui nilai signifikansi, kurang dari 5% atau 10% maka mengaplikasikan metode estimasi *fixed effect models*. Sedangkan bila nilai *p-value* lebih dari 5% atau 10% maka metode estimasi mengaplikasikan *random effect] models*.

3.3.7. Pengujian Hipotesis

3.3.7.1. Koefisien Determinasi (R-Squared)

Koefisien determinasi membahas mengenai kualitas garis regresi. Dengan mengetahui sejauh mana koefisien determinasi, kita dapat mengetahui sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Garis regresi ideal terjadi ketika semua data berada tepat pada garis regresi. Namun, kondisi tersebut jarang terjadi, biasanya nilai $\hat{\epsilon}_i$ dapat positif atau negatif. Ketika hal ini terjadi, artinya garis regresi yang terbentuk tidak sempurna secara keseluruhan. Harapannya adalah mendapatkan garis regresi dengan nilai $\hat{\epsilon}_i$ seminimal mungkin. Nilai *R-Squared* menunjukkan kualitas model yang dibuat, semakin tinggi angkanya, semakin baik modelnya. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan, dan Pengangguran. terhadap variabel dependen yaitu Ketimpangan (*Gini Ratio*) maka mengaplikasikan analisis koefisien Determinasi (*R-Squared*).

Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1. Jika nilai mendekati 1, artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Namun, jika nilai R^2 semakin kecil, artinya kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen cukup terbatas (Ghozali, 2016).

3.3.7.2. Uji Analisis f-statistik

Uji analisis F statistik digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji F diketahui dari nilai probabilitas. probabilitas $<5\%$ maka menolak H_0 yang artinya berpengaruh terhadap

variabel dependen, sedangkan probabilitas $>5\%$ maka gagal menolak H_0 yang artinya tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.3.7.3. Uji Analisis t-statistik

Uji t adalah metode yang digunakan untuk memeriksa kebenaran atau kesalahan hipotesis nol menggunakan data sampel. Uji parsial berguna untuk menentukan sejauh mana pengaruh variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil uji t diketahui dari perbandingan nilai probabilitas dengan tingkat signifikansi. Apabila probabilitas $<5\%$ maka menolak H_0 yang artinya berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan probabilitas $>5\%$ maka gagal menolak H_0 yang artinya tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

1. Variabel Kemiskinan terhadap Ketimpangan regional di Provinsi Jambi.

$H_0 : \beta_1 = 0$ Kemiskinan tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan regional di Provinsi Jambi.

$H_a : \beta_1 < 0$ Kemiskinan berpengaruh positif terhadap Ketimpangan Regional di Provinsi Jambi.

2. Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap ketimpangan regional di Provinsi Jambi.

$H_0 : \beta_2 = 0$ Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan regional di Provinsi Jambi.

$H_a : \beta_2 < 0$ Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif terhadap Ketimpangan regional di Provinsi Jambi.

3. Variabel Produk Domestik Regional Bruto terhadap Ketimpangan Regional di Provinsi Jambi.

$H_0 : \beta_3 = 0$ Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan regional di Provinsi Jambi.

$H_a : \beta_3 > 0$ Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan regional di Provinsi Jambi.

4. Variabel Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan regional di Provinsi Jambi.

$H_0 : \beta_4 = 0$ Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan regional di Provinsi Jambi.

$H_a : \beta_4 > 0$ Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan regional di Provinsi Jambi.

BAB IV

HASIL ANALISIS

4.1. Analisis Deskriptif Data

Penelitian ini disajikan menggunakan analisis data panel dengan mengkaji terkait faktor yang mempengaruhi Ketimpangan Regional di Provinsi Jambi tahun 2011 hingga 2022. Data menggunakan data time series dengan periode waktu 2011-2022 dan data (*cross-section*) yang mencakup 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (Kerinci, Merangin, Sarolangun, Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjab Timur, Tanjab Barat, Tebo, Bungo, Kota Jambi, Sungai Penuh).

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan regional adalah Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Produk Domestik Regional Bruto, dan Indeks Pembangunan Manusia. Untuk mengolah data, penelitian ini menggunakan analisis data panel dan alat pengolahan data yang digunakan dengan bantuan software Eviews 12. Berikut deskripsi data variabel yang digunakan dalam penelitian ini :

Tabel 4.1 Deskriptif Data Penelitian (%)

	Ketimpangan Regional (%)	Kemiskinan (%)	TPT (%)	PDRB Milyar (Rp)	IPM (%)
Mean	0,313	7,991	4,119	17246,15	68,68
Maximum	0,41	14,17	10,81	151117,68	79,58
Minimum	0,24	2,76	0,73	2770,91	57,77
Std. deviasi	0,033664	2,761141	1,947668	22172,8133	4,075745

Sumber: Data Sekunder Diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah observasi setiap variabel berjumlah 132 data. Variabel Ketimpangan Regional memiliki nilai minimum sebesar 0.24. Dan nilai maksimum sebesar 0,41. Rata-Rata ketimpangan sebesar 0.313.181. Serta nilai standar deviasi 0.033.664. Variabel kemiskinan memiliki nilai minimum sebesar 2.76. Dan nilai maksimum sebesar 14.17. Rata-Rata kemiskinan sebesar 7.991.363. Serta nilai standar deviasi 2.761.141. Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki nilai minimum 0,73 dan nilai maksimum sebesar 10.81. Rata-Rata tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,119.772 serta nilai standar deviasi sebesar 1,947.668. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki nilai minimum 2770.91 dan nilai maksimum sebesar 151117,68. Rata-rata produk domestik regional bruto (PDRB) sebesar 17246,15659 serta nilai standar deviasi sebesar 22172,8133. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki nilai minimum 57.77 dan nilai maksimum sebesar 79,58. Rata-Rata indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 68,68856061 serta nilai standar deviasi sebesar 4,075745.

4.2. Regresi Data Panel

Ada tiga (3) model dalam metode regresi data panel, yaitu *Common Effect Models*, *Fixed Effect Models*, dan *Random Effect Models*. Untuk mendapatkan estimasi terbaik, diperlukan langkah-langkah seperti uji chow, uji hausman, dan uji LM dalam melakukan uji data panel.

Tabel 4.2 Hasil Estimasi Regresi Model Panel Menggunakan Common Effect models, Fixed Effect Models, dan Random Effect Models

Variabel	<i>Common Effect Models</i>		<i>Fixed Effect Models</i>		<i>Random Effect Models</i>	
	Coefficient	Prob	Coefficient	Prob	Coefficient	Prob
C	0.161355	0.0106	0.410353	0.0003	0.318344	0.0002
Kemiskinan	0.001970	0.0828	0.011994	0.0060	0.002479	0.2213
TPT	0.004506	0.0105	-4.15E-05	0.9806	0.002165	0.1785

PDRB	-2.32E-07	0.0700	-3.90E08	0.7445	-1.92E-07	0.0894
IPM	0.001769	0.0513	-0.002798	0.0455	-0.000445	0.6867
F-statistic	5.823577		8.061670		1.624185	
Prob(F-statistic)	0.000246		0.000000		0.172148	
R-Squared	0.154991		0.491002		0.048666	
Observations	132		132		132	

Sumber: Data Sekunder Diolah (2023)

4.2.1. Pemilihan Model

Dalam penelitian menggunakan regresi data panel, ada tiga metode yang dapat digunakan untuk memilih model regresi, yaitu *Common Effect Models*, *Fixed Effect Models*, dan *Random Effect Models*. Untuk memilih model yang tepat dalam konteks penelitian ini, dapat dilakukan uji Chow dan Uji Hausman.

4.2.2. Uji Chow

Metode ini adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mempertimbangkan pemilihan model antara *common effect* dan *fixed effect*, beserta hasil uji chow yang terkait :

Tabel 4.3 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	7.723656	(10,117)	0.0000
Cross-section Chi square	66.911179	10	0.0000

Sumber: Data Sekunder Diolah (2023)

Berdasarkan dari tabel dapat diketahui nilai probabilitas *Cross-section Chi-square* sebesar $0.0000 < 0.05$ atau 5% maka menolak H_0 yang berarti bahwa model yang tepat digunakan yaitu model *fixed effect models*

4.2.3. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Tabel 4.4 Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM)

	Cross-Section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch-Pagan	22.33760 (0.0000)	8.143513 (0.0043)	30.48111 (0.0000)

Hasil uji LM digunakan untuk memilih antara *Random Effect Models* (REM) atau *Cross Effect Models* (CEM). Menurut dari tabel IV yang ada diatas dapat diketahui nilai probabilitas *Breusch-Pagan* sebesar $0.0000 < 0.05$ atau 5% maka menolak H_0 yang menjelaskan bahwa model yang tepat untuk digunakan adalah *Random Effect Models*.

4.2.4. Uji Hausman

Uji hausman merupakan metode yang dapat digunakan dalam memilih antara model *fixed effect* atau *random effect* berikut hasil uji hausman.

Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob
Cross-section random	21.739816	4	0.0002

Sumber: Data Sekunder Diolah (2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai probabilitas *cross-section* random sebesar $0.0002 < 5\%$ maka menolak H_0 yang berarti bahwa model yang tepat untuk digunakan adalah *fixed effect models*.

4.3. Model Regresi Terbaik

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa model yang paling optimal untuk melakukan analisis adalah regresi *fixed effect models*.

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Fixed Effect Models

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	0.410353	3.732600	0.0003
Kemiskinan	0.011994	2.800515	0.0060
TPT	-4.15E-05	-0.024327	0.9806
PDRB	-3.90E-08	-0.326641	0.7445
IPM	-0.0022798	-2.021710	0.0455
R-squared	0.491002		0.313182
F-statistic	8.061670		1.858162
Prob(F-statistic)	0.000000		0.000000

Berdasarkan tabel data hasil yang telah disajikan di atas, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi untuk mengetahui pengaruh variabel independen, seperti Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terhadap variabel dependen Ketimpangan Regional (Indeks Gini). Evaluasi tersebut melibatkan pengukuran koefisien determinasi, uji f-statistik, dan uji t-statistik.

4.3.1. Koefisien Determinasi (R-Squared)

Dari tabel tersebut, diperoleh nilai R-Squared sebesar 0.491002, yang mengindikasikan bahwa dalam penelitian ini variabel independen seperti Kemiskinan, TPT, PDRB dan IPM dapat menjelaskan sekitar 49,10% variasi dari variabel dependen Ketimpangan Regional (Gini Rasio). Sementara itu, sisanya sebesar 50,90% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

4.3.2. Uji Analisis F-Statistik

Uji analisis f-statistik dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh secara simultan dari koefisien variabel regresi. Dari tabel hasil regresi yang diberikan, terlihat bahwa nilai P-value sebesar $0.000000 < \alpha$ (5%), yang menunjukkan adanya signifikansi dalam menolak H_0 . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel independen seperti Kemiskinan, TPT, PDRB, dan IPM memiliki pengaruh yang signifikan atau simultan terhadap variabel dependen Ketimpangan Regional (Gini Rasio).

4.3.3. Uji Analisis T-Statistik

Uji analisis distribusi t statistik dilakukan untuk menguji apakah masing-masing variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil uji t:

a. Variabel Kemiskinan terhadap Ketimpangan Regional (Gini Rasio)

$H_0 : \beta_1 = 0$ Kemiskinan tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Regional di Provinsi Jambi.

$H_a : \beta_1 > 0$ Kemiskinan berpengaruh positif terhadap Ketimpangan Regional di Provinsi Jambi.

Variabel Kemiskinan memiliki nilai koefisien sebesar 0.011994 dan nilai probabilitas sebesar $0.0060 < \alpha$ (5%) maka menolak H_0 sehingga variabel Kemiskinan berpengaruh positif terhadap variabel Ketimpangan Regional di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2011-2022.

b. Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Ketimpangan Regional di Provinsi Jambi.

$H_0 : \beta_2 = 0$ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Regional di Provinsi Jambi.

$H_a : \beta_2 < 0$ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif terhadap Ketimpangan Regional di Provinsi Jambi.

Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki nilai koefisien sebesar $-4.15E-05$ dan nilai probabilitas sebesar $0.9806 > \alpha$ (5%) maka gagal menolak H_0 sehingga variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Regional di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 2011-2022.

c. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Ketimpangan Regional di Provinsi Jambi.

$H_0 : \beta_3 = 0$ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Regional di Provinsi Jambi.

$H_a : \beta_3 < 0$ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan Regional di Provinsi Jambi.

Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki nilai koefisien sebesar $-3.90E-08$ dan nilai probabilitas sebesar $0.7445 > \alpha$ (5%) maka gagal menolak H_0 sehingga variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap variabel Ketimpangan Regional di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 2011-2022.

d. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketimpangan Regional di Provinsi Jambi.

$H_0 : \beta_4 = 0$ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Regional di Provinsi Jambi.

$H_a : \beta_4 > 0$ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan regional di Provinsi Jambi.

Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki nilai koefisien sebesar - 0.002798 dan nilai probabilitas sebesar $0.0445 > \alpha$ (5%) maka menolak H_0 sehingga variabel nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap variabel Ketimpangan Regional di 11 Kab/Kota di Provinsi Jambi tahun 2011-2022.

4.3.4. Analisis Ekonomi

4.3.4.1. Analisis Pengaruh Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Regional

Berdasarkan hasil estimasi diatas, maka didapatkan nilai koefisien sebesar 0.011994 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0060 sehingga variabel Kemiskinan berpengaruh positif terhadap variabel ketimpangan regional di Provinsi Jambi. Diketahui bahwa jika tingkat kemiskinan di suatu daerah atau wilayah Provinsi Jambi meningkat sebesar satu persen maka akan berdampak menurunkan tingkat ketimpangan di suatu wilayah tersebut. Menurut peneliti rendahnya tingkat kemiskinan di suatu daerah atau wilayah belum tentu memberi jaminan jauhnya dari ketimpangan belum dapat dipastikan setiap masyarakat di suatu wilayah yang memiliki pendapatan rendah memiliki hidup tidak layak dan tidak mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, adapun pemerintah telah melakukan banyak usaha untuk mengatasi ketimpangan, termasuk melalui pengaturan distribusi pendapatan yang lebih merata dan program-program perlindungan sosial. Selain itu, Untuk mengatasi ketimpangan regional yang diakibatkan oleh kemiskinan, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi daerah-daerah miskin, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta mendorong investasi dalam infrastruktur dan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi untuk tumbuh. Adapun program untuk mengatasi kemiskinan yaitu; Program Pangan Subsidi: Program ini memberikan subsidi atau bantuan untuk memastikan akses masyarakat miskin terhadap pangan yang cukup dan bergizi. Pemerintah bisa memberikan subsidi pada harga pangan tertentu atau mendistribusikan bantuan pangan langsung kepada keluarga miskin.

Program Pelatihan Keterampilan: Program ini memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada masyarakat miskin agar mereka dapat meningkatkan kesempatan kerja dan usaha mandiri.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan kemiskinan berpengaruh positif terhadap ketimpangan regional. Penelitian ini sejalan dengan (Hindun et al (2019) menyatakan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan. Pada hasil pengujian, hubungan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan adalah positif. Safitri et al, (2021) juga menyatakan bahwa Kemiskinan tidak berpengaruh terhadap ketimpangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Semakin meningkat tingkat kemiskinan, maka akan semakin meningkat pula tingkat ketimpangan pendapatan atau di suatu wilayah, dan sebaliknya. Kemiskinan adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya ketimpangan pendapatan di suatu wilayah. Kemiskinan terjadi ketika kebutuhan minimum tidak terpenuhi. Penurunan kemiskinan menandakan bahwa masyarakat telah berhasil mencapai kecukupan kebutuhan minimum mereka.

4.3.4.2. Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Ketimpangan Regional

Berdasarkan hasil estimasi diatas, maka didapatkan nilai koefisien sebesar $-4.15E-05$ dengan nilai probabilitas sebesar 0.9806 sehingga variabel Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh terhadap variabel ketimpangan regional. Variabel pengangguran direpresentasikan oleh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tidak terdampaknya pengangguran terhadap disparitas regional di Provinsi Jambi disebabkan oleh tindakan pemerintah, termasuk pemberian bantuan sosial melalui program-program yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat. Salah satu contohnya adalah pendirian balai Latihan Kerja yang dapat membantu warga dalam meningkatkan keterampilan kerja. Adanya bantuan ini berhasil mengurangi beban finansial masyarakat, walaupun masih ada ketidakmerataan distribusi di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Selain itu, mayoritas pengangguran masih mengandalkan pendapatan dari anggota keluarga yang

bekerja dan menggunakan tabungan sampai mereka mendapatkan pekerjaan dan gaji. Diketahui bahwa setiap peningkatan jumlah pengangguran akan berdampak pada peningkatan ketimpangan yang ada di Provinsi Jambi. pengangguran secara keseluruhan dianggap sebagai masalah yang penting kemudian harus diselesaikan oleh pemerintah. Mengatasi masalah pengangguran adalah bentuk tugas dari pemerintah, yang harus Mendorong penanaman modal di bidang-bidang yang memiliki potensi untuk menciptakan kesempatan kerja baru, Memperbaiki ketersediaan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja serta Memberikan imbalan kepada perusahaan yang berhasil menciptakan lapangan kerja baru. Dengan terkendalinya lapangan pekerjaan baru dan banyaknya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah maka pengangguran di Provinsi Jambi dapat diturunkan. Temuan ini sesuai dengan pendapat yang dikatakan oleh (Todaro, 2013) yang menyatakan bahwa masalah pengangguran memiliki hubungan yang erat dengan masalah kesejahteraan masyarakat secara umum. Tingkat pengangguran terbuka menjadi salah satu petunjuk dalam mengukur tingkat kesejahteraan dan keberlanjutan ekonomi dalam suatu wilayah. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap ketimpangan regional.

Hasil penelitian ini didukung oleh Farhan & Sugianto, (2022) yang menyatakan bahwa variabel pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Secara umum, tingkat pengangguran terbuka cenderung lebih tinggi di kalangan penduduk usia muda yang baru memasuki angkatan kerja.

4.3.4.3. Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Ketimpangan Regional

Berdasarkan hasil estimasi diatas, maka didapatkan nilai koefisien sebesar $-3.90E-08$ dengan nilai probabilitas sebesar 0.7445 sehingga variabel Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh terhadap variabel ketimpangan regional. Artinya apabila PDRB mengalami kenaikan 1 Rupiah (Rp) maka akan menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang ada di Provinsi Jambi. Terdapat hubungan erat antara pertumbuhan,

tingkat kemiskinan, dan ketimpangan di mana pada tahap awal pembangunan di Provinsi Jambi kemiskinan cenderung meningkat, dan ketika mendekati tahap akhir pembangunan, jumlah penduduk miskin secara perlahan menurun serta jumlah ketimpangan juga menurun. Untuk mengurangi ketimpangan Pemerintah telah memberikan kebijakan yaitu kebijakan pemerataan lahan, kebijakan pemerataan kesempatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk menggenjot laju pertumbuhan, pembangunan secara merata. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai pengaruh positif terhadap ketimpangan regional.

pada teori Kurva Kuznets, yang menggambarkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan dalam suatu masyarakat. Teori ini dikemukakan oleh ekonom Simon Kuznets pada tahun 1955 dan mengajukan bahwa dalam tahap awal pembangunan ekonomi, ketimpangan cenderung meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, namun pada tahap tertentu, ketimpangan akan mulai menurun. Pada teori Kurva Kuznets, yang menggambarkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan dalam suatu masyarakat. Teori ini dikemukakan oleh ekonom Simon Kuznets pada tahun 1955 dan mengajukan bahwa dalam tahap awal pembangunan ekonomi, ketimpangan cenderung meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, namun pada tahap tertentu, ketimpangan akan mulai menurun. Ini bisa dijelaskan sebagai berikut:

Tahap Pertumbuhan Awal: Pada tahap awal pembangunan ekonomi, investasi biasanya lebih terkonsentrasi di sektor-sektor yang produktif, seperti industri dan pertanian modern. Ini cenderung menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat, tetapi karena sektor ini memerlukan keterampilan yang lebih tinggi, ketimpangan mungkin meningkat karena pekerja di sektor tradisional yang kurang produktif tertinggal.

Tahap Pertumbuhan Menengah: Pada titik tertentu, sektor-sektor produktif ini mulai menciptakan lebih banyak pekerjaan, yang akhirnya mengurangi pengangguran. Ini memberikan peluang bagi lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam ekonomi dan meratakan pendapatan. Selain itu, kesadaran akan perlunya pembangunan sosial dan perlindungan sosial mungkin meningkat, yang dapat membantu mengurangi ketimpangan.

Diversifikasi dan Investasi Sosial: Seiring berjalannya waktu, negara-negara cenderung lebih berinvestasi dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial lainnya. Ini membantu menciptakan kesempatan bagi lebih banyak orang untuk mengembangkan keterampilan dan memperoleh pendidikan yang lebih baik. Diversifikasi ekonomi juga dapat membuka peluang bagi berbagai kelompok masyarakat.

Pendekatan Titik Balik (Turning Point): Pada titik tertentu, dampak positif dari pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan investasi dalam sektor sosial dapat mulai mengurangi ketimpangan. Ini menghasilkan bentuk kurva yang menyerupai huruf "N" atau "J." Meskipun ada perbedaan dalam bentuk kurva antara berbagai negara dan konteks, konsep umumnya tetap sama.

Hasil penelitian ini didukung oleh Astuti dan Hukom (2023) variabel PDRB negatif dan tidak signifikan secara statistik dalam memprediksi ketimpangan pendapatan (Gini Ratio). Hal ini menunjukkan bahwa PDRB hanya berdampak kecil pada sejauh mana orang dibayar secara tidak setara.

4.3.4.4. Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Ketimpangan Regional

Indeks Pembangunan Manusia digunakan sebagai alat ekonomi untuk memahami dan mengukur tingkat harapan hidup dan efisiensi sumber daya manusia di suatu wilayah. Berdasarkan hasil estimasi diatas, maka didapatkan nilai koefisien sebesar -0.0022798 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0455 sehingga variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh terhadap variabel ketimpangan regional. Jika Indeks pembangunan manusia (IPM) meningkat sebesar 1% maka ketimpangan wilayah di Kabupaten/Kota di provinsi Jambi akan menurun sebesar 0.0022798%. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai pengaruh positif terhadap ketimpangan regional. Menurut peneliti tersebut, tingginya nilai indeks pada suatu wilayah tidak selalu menjamin mereka akan terhindar dari ketimpangan. Sebagai contoh, jika melihat bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan, belum dapat dipastikan bahwa daerah atau individu

dengan pendidikan berkualitas tinggi akan mampu menjalani kehidupan yang layak dan mendapatkan pekerjaan sesuai keinginan mereka. Situasi seperti ini menjadi penyebab peningkatan pengangguran dan akhirnya meningkatkan angka ketimpangan. IPM memungkinkan analisis ketimpangan yang lebih menyeluruh. Dengan mencakup tiga dimensi utama pembangunan manusia, IPM memberikan pandangan yang lebih luas tentang tingkat ketimpangan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Ini membantu mendeteksi kesenjangan tidak hanya dalam pendapatan, tetapi juga dalam kesehatan dan pendidikan. adapun program pendidikan dan kesehatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan IPM di suatu daerah atau wilayah dengan memberikan akses dan kualitas pendidikan: Meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat dengan menyediakan fasilitas sekolah yang memadai dan berkualitas. Program ini harus memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dasar dan menengah yang layak, Program Beasiswa: Menyediakan program beasiswa atau bantuan keuangan bagi siswa berprestasi tetapi kurang mampu agar mereka dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, akses layanan kesehatan: Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Ini dapat mencakup memperkuat infrastruktur kesehatan, membangun puskesmas, dan meningkatkan akses ke obat-obatan dan peralatan medis, dan Program Imunisasi: Melakukan program imunisasi massal untuk mencegah penyebaran penyakit menular dan melindungi kesehatan masyarakat

Hasil penelitian ini didukung oleh Istiqomah dan Hoetoro (2018) menyatakan bahwa variabel indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dan menurut Zusanti et al, (2020) hubungan yang jelas antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan ketimpangan wilayah di Pulau Jawa. Dalam hal ini, perbaikan pembangunan manusia berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Perbaikan tersebut terlihat dari peningkatan nilai IPM yang pada gilirannya menyebabkan penurunan tingkat ketimpangan wilayah di Pulau Jawa pada rentang waktu tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kemiskinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Regional di Provinsi Jambi.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Ketimpangan Regional di Provinsi Jambi
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Ketimpangan Regional di Provinsi Jambi.
4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Ketimpangan Regional di Provinsi Jambi.

5.2. Implikasi

Dari kesimpulan yang telah disampaikan, penulis bertujuan untuk menunjukkan beberapa implikasi yang dapat diambil dari temuan penelitian ini, antara lain:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh terhadap pengurangan ketimpangan regional. Dalam upaya mengurangi ketimpangan regional yang disebabkan oleh kemiskinan, pemerintah perlu menerapkan kebijakan dan program yang fokus pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah miskin. Agar tingkat Ketimpangan tidak mengalami kenaikan berlebih yang dapat berpengaruh pada Kemiskinan, Pengangguran, PDRB, IPM di wilayah tersebut.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks pembangunan manusia (IPM) tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan regional. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau pemberdayaan masyarakat. IPM memungkinkan pemerintah untuk lebih memahami wilayah-wilayah yang paling rentan terhadap ketidaksetaraan dan kemiskinan. Serta IPM dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur efektivitas kebijakan dan program pembangunan yang telah diimplementasikan di suatu wilayah. Jika IPM meningkat dari tahun ke tahun, itu menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil telah berhasil dalam meningkatkan perkembangan manusia di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, W. (2013). *E. P. dan Aplikasinya*. Ekonosia. Jakarta. (2013). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*.
- Arafah, M., & Khoirudin, R. (2022). Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 5(2), 628. <https://doi.org/10.20527/jiep.v5i2.6408>
- Arsyad, L. (2015). Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi. *Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan*, 05(01), 1–37.
- Astuti, D., & Hukom, A. (2023). Analisis Pengaruh PDRB, IPM dan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Kalimantan Tengah. *OPTIMAL Jurnal EkonomidanManajemen*, 3(2), 73–84.
<https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/optimal/article/view/1395>
- Badan Pusat Statistik. (2022a). *Rasio Gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva lorenz (daerah A)*.
https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_page=53&Istilah_sort=deskripsi_ind
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2017-2021, Buku 1 Pulau Sumatera*.
<https://www.bps.go.id/publication/2022/09/06/125a97210d7c0fb1123b4d2b/tinjauan-regional-berdasarkan-pdrb-kabupaten-kota-2017--2021--buku-1-pulau-sumatera.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *laju pertumbuhan ekonomi provinsi jambi menurut kab/kota*.
<https://jambi.bps.go.id/indicator/11/1855/1/laju-pertumbuhan-ekonomi-provinsi-jambi-menurut-kabupaten-kota.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Produk Domestik*. <https://www.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto--lapangan-usaha-.html>

- Badan Pusat Statistika. (2022). *TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)*.
[https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#:~:text=TPT\(Tingkat Pengangguran Terbuka\) adalah,kurang dari 35 jam seminggu](https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#:~:text=TPT(Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah,kurang dari 35 jam seminggu).
- bpk.go.id. (2014). *tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38209/uu-no-9-tahun-2015>
- bps.go.id. (2023). *Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah 2021-2022*.
<https://www.bps.go.id/indicator/23/98/1/gini-rasio.html>
- Catalano, V., Turdo, A., Di Franco, S., Dieli, F., Todaro, M., & Stassi, G. (2013). *Tumor and its microenvironment: a synergistic interplay*. In *Seminars in cancer* ((Vol. 23), Academic Press. <https://doi.org/522-532>).
- Dewanto, F. W., & Rahmawati, F. (2021). Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarwilayah (Studi di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia) Tahun 2014-. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 4(1), 46–60.
- djpbkemenkeujambi. (2020). <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jambi/id/>
- Ersad, M. E., Amir, A., & Zulgani, Z. (2022). Dampak IPM, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(2), 425–438.
<https://doi.org/10.22437/jpe.v17i2.15614>
- Farhan, M., & Sugianto, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Jawa. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(4), 243–258.
<https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.29>
- Feriyanto. (2014). *ekonomi sumber daya manusia dalam perspektif indonesia* (Purnamasari, Ed.). UPP STIM YKPN.
- Ghozali. (2016). aplikasi analisis multivariate dengan program ibm spss 23. *aplikasi analisis multivariate dengan program ibm spss 23*.

- Hapsari. (2019). Masyarakat Yang Tinggal di Lumbung Energi Sudah Sejahtera (?). *Jurnal Ilmiah Populer, Volume 03*.
<https://www.bpsjambi.id/Median/index.php/median/article/download/27/24>
- Hariani, E. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di 38 Kabupaten/ Kota Jawa Timur Tahun 2012-2015. *the International Journal of Applied Business Tijab*, 3(1), 1–11.
- Hindun, H., Soejoto, A., & Hariyati, H. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 8(3), 250. <https://doi.org/10.26418/jebik.v8i3.34721>
- Istiqomah, R. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM dan Investasi (PMA) Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi (Studi Kasus di Pulau Jawa Tahun 2011-2016). *Jurnal Ilmiah*, 10(05), 1–8.
- jambi bps go.id. (2023). *Rasio Gini Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 2020-2022*.
<https://jambi.bps.go.id/indicator/23/51/1/gini-rasio-kabupaten-kota-.html>
- jambi klik. (t.t.). *Pertumbuhan Ekonomi Tanjabtim Terendah Seprovinsi Jambi*.
<https://www.jambiklik.id/2023/03/pertumbuhan-ekonomi-tanjabtim-terendah.html>
- Kompas.id. (t.t.). *Ketimpangan Orang Miskin dan Kaya di Jambi Tertinggi di Pulau Sumatera*.
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/02/01/ketimpangan-orang-miskin-dan-kaya-di-jambi-tertinggi-di-pulau-sumatera>
- kuncoro. (2006). *ekonomi pembangunan : teori, masalah, dan kebijakan Ed.IV* (Ed.IV). UPP STIM YKPN.
- Kusuma, D. S. D., Sarfiah, S. N., & Septiani, Y. (2019). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2017. *Dinamic: Directory Journal of Economic*, 1(3), 338–347.
- Lala, A. J., Naukoko, A. T., & Siwu, H. F. D. (2023). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi manusia terhadap tingkat ketimpangan pendapatan (studi pada kota-kota di Provinsi Utara) Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 23(1), 61–72.

- Mankiw. (2018). *Pengantar ekonomi makro* (Edisi : 7).
- Nurrahmah, I., Wijaya, R. P., Hakim, S. R., Yahya, Y., & Nooraeni, R. (2020). Determinant Analysis of Open Unemployment Level in Banten Province, 2018 Using Panel Data Regression. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 2(2), 191–201. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v2i2.6332>
- Okuputra, M. A., & Nasikh, N. (2022). Pengaruh inovasi daerah terhadap kemiskinan. *Inovasi*, 18(1), 159–166. <https://doi.org/10.30872/jinv.v18i1.10379>
- P, T. M., & C, S. S. (2011). *Pembangunan Ekonomi / Michael P. Todaro, Stephen C. Smith* (jilid. 1, hlm. 518 hlm). Erlangga.
- Pasaribu, R., Tampubolon, D., & Hamidi, W. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah, Dan pertumbuhan Penduduk, Terhadap Kesempatan Kerja Diprovinsi Riau Periode 2011-2020. *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, 2(2), 99–110. <https://doi.org/10.52300/jep.v2i2.7464>
- Putri, Y. E., & Erita, E. (2019). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan, Panel Data Enam Provinsi Di Pulau Jawa. *Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi*, 9(1), 27. <https://doi.org/10.24036/011041740>
- Radarjambi.co.id. (2022). *jambi peringkat 2 pertumbuhan ekonomi se sumatera*. <https://radarjambi.co.id/read/2022/01/06/27846/al-haris-jambi-peringkat-2-pertumbuhan-ekonomi-se-sumatera/>
- Robert, B., & Brown, E. B. (2004). *Faktor - faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di sulawesi selatan*. 1, 1–14.
- Safitri, E., Junaidi, J., & Erfit, E. (2021). Analisis disparitas pembangunan antar Kabupaten/Kotadi Provinsi Jambi (segi ekonomi dan non ekonomi). *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(1), 141–150. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i1.10156>
- Sri Hartati, Y. (2022). Analisis Ketimpangan Ekonomi Di Provinsi Papua. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(2), 19–29. <https://doi.org/10.55049/jeb.v14i2.116>
- Tarigan. (2005). *Ekonomi regional: teori dan aplikasi / Robinson Tarigan* (Ed. rev). Bumi Aksara.
- word bank. (2016). <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016>

- yanuar. (2009). *ekonomi makro : suatu analisis untuk konteks Indonesia / Yanuar*. Jakarta Yayasan MpuAjarArtha.
<http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=104646&pRegionCode=UNTA R&pClientId=650>
- Yoertiara, R. F., & Feriyanto, N. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan provinsi-provinsi di pulau Jawa. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 1(1), 92–100.
<https://doi.org/10.20885/jkek.vol1.iss1.art9>
- Zasriati, M. (2022). Analisis Ketimpangan Pembangunan Di Indonesia Tahun 2010-2020. *Al-Dzabab*, 3(2), 119–131. <https://doi.org/10.32939/dhb.v3i2.1494>
- Zusanti, R. D., Sasana, H., & Rusmijati, R. (2020). rhrjerhrje. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 2(3), 603–615.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Data Penelitian

Kabupaten/Kota	Tahun	Ketimpangan	Kemiskinan	TPT	PDRB	IPM
Kerinci	2011	0,31	7,36	3,85	3865,5	65,85
Kerinci	2012	0,32	7,71	4,42	4155,51	66,71
Kerinci	2013	0,30	7,35	7,13	4411,41	67,49
Kerinci	2014	0,27	7,43	4,44	4811,38	67,96
Kerinci	2015	0,32	8,16	3,67	5120	68,89
Kerinci	2016	0,28	7,48	3,67	5464,05	69,68
Kerinci	2017	0,28	7,45	3,26	5784,49	70,03
Kerinci	2018	0,32	7,07	2,74	6069,6	70,59
Kerinci	2019	0,29	7,13	2,62	6326,54	70,95
Kerinci	2020	0,28	7,30	2,43	6570,81	71,21
Kerinci	2021	0,28	7,71	2,32	6844,24	71,45
Kerinci	2022	0,28	7,57	2,63	37164,22	71,99
Merangin	2011	0,32	7,68	4,55	6251,81	64,4
Merangin	2012	0,31	8,09	2,80	6649,79	65,31
Merangin	2013	0,33	9,31	6,01	7078,93	65,82
Merangin	2014	0,33	9,37	2,55	7583,45	66,21
Merangin	2015	0,36	9,80	5,38	7992,84	67,15
Merangin	2016	0,33	9,95	4,74	8489,68	67,86
Merangin	2017	0,30	9,43	4,10	8947,14	68,30
Merangin	2018	0,35	8,88	3,47	9388,24	68,81
Merangin	2019	0,31	8,48	3,68	9787,46	69,07
Merangin	2020	0,32	8,63	4,86	9869,18	69,19

Merangin	2021	0,29	9,11	4,83	10371,68	69,53
Merangin	2022	0,35	8,70	4,69	69697,69	69,98
Sarolangun	2011	0,41	9,10	4,33	7063,71	65,20
Sarolangun	2012	0,36	9,46	1,91	7663,23	66,16
Sarolangun	2013	0,38	10,51	3,64	8246,15	67,13
Sarolangun	2014	0,31	10,17	4,13	8675,19	67,67
Sarolangun	2015	0,39	10,29	4,53	8986,68	68,10
Sarolangun	2016	0,34	9,33	3,39	9369,74	68,73
Sarolangun	2017	0,36	8,87	2,25	9808,65	69,03
Sarolangun	2018	0,29	8,73	4,06	10279,95	69,41
Sarolangun	2019	0,27	8,45	4,09	10717,75	69,72
Sarolangun	2020	0,31	8,42	5,71	10690,79	69,86
Sarolangun	2021	0,32	8,87	5,52	11397,73	70,25
Sarolangun	2022	0,30	8,48	5,22	88104,45	70,89
Batang Hari	2011	0,32	9,56	4,56	7492,94	66,32
Batang Hari	2012	0,30	10,13	3,06	8118,65	66,97
Batang Hari	2013	0,29	10,42	5,94	8644,8	67,24
Batang Hari	2014	0,29	10,50	5,69	9298,57	67,68
Batang Hari	2015	0,26	10,69	3,38	9695,29	68,05
Batang Hari	2016	0,30	10,79	3,48	10146,14	68,70
Batang Hari	2017	0,25	10,33	3,57	10634,36	68,92
Batang Hari	2018	0,30	10,23	3,87	11147,66	69,33
Batang Hari	2019	0,31	9,75	4,56	11713,38	69,67
Batang Hari	2020	0,32	9,65	4,42	11667,61	69,84
Batang Hari	2021	0,31	10,05	4,26	12221,19	70,11
Batang Hari	2022	0,29	9,63	3,53	69049,72	70,51

Muaro Jambi	2011	0,26	4,98	6,01	10134,02	63,39
Muaro Jambi	2012	0,30	5,08	2,43	10866,52	64,17
Muaro Jambi	2013	0,28	4,58	2,78	11643,6	65,14
Muaro Jambi	2014	0,24	4,45	4,36	12578,25	65,71
Muaro Jambi	2015	0,34	4,63	5,40	13238,01	66,66
Muaro Jambi	2016	0,34	4,30	5,40	13964,19	67,55
Muaro Jambi	2017	0,32	4,37	5,39	14655,06	67,86
Muaro Jambi	2018	0,31	4,05	4,52	15389,57	68,34
Muaro Jambi	2019	0,29	3,83	5,20	16126,72	69,01
Muaro Jambi	2020	0,28	3,83	5,43	16186,86	69,18
Muaro Jambi	2021	0,32	4,53	5,59	16847,01	69,55
Muaro Jambi	2022	0,27	4,47	5,35	151117,68	70,18
Tanjab Timur	2011	0,30	11,6	2,26	13673,46	57,77
Tanjab Timur	2012	0,28	12,5	2,12	14053,62	58,63
Tanjab Timur	2013	0,28	13,42	3,53	14695,73	59,41
Tanjab Timur	2014	0,36	13,55	1,73	15549,5	59,88
Tanjab Timur	2015	0,29	14,17	1,44	15830,52	61,12
Tanjab Timur	2016	0,26	12,76	1,90	16249,8	61,88
Tanjab Timur	2017	0,28	12,58	2,36	16748,26	62,61
Tanjab Timur	2018	0,29	12,38	1,80	17241,2	63,32
Tanjab Timur	2019	0,29	11,54	1,63	17967,59	63,92
Tanjab Timur	2020	0,25	10,95	1,41	17262,51	64,43
Tanjab Timur	2021	0,25	11,39	1,56	17284,93	64,91
Tanjab Timur	2022	0,27	10,91	1,32	27137,34	65,77
Tanjab Barat	2011	0,34	10,43	4,19	20794,46	61,98
Tanjab Barat	2012	0,32	10,92	2,77	21822,84	62,86

Tanjab Barat	2013	0,31	11,61	4,90	23073,56	63,54
Tanjab Barat	2014	0,33	11,64	1,34	24551,69	64,04
Tanjab Barat	2015	0,36	12,63	2,68	25446,12	65,03
Tanjab Barat	2016	0,33	11,81	2,88	26245,2	65,91
Tanjab Barat	2017	0,29	11,32	3,07	27421,79	66,15
Tanjab Barat	2018	0,36	11,10	2,38	29279,46	67,13
Tanjab Barat	2019	0,28	10,56	2,57	30744,99	67,54
Tanjab Barat	2020	0,28	10,29	2,16	30559,42	67,54
Tanjab Barat	2021	0,25	10,75	2,53	30976,2	68,16
Tanjab Barat	2022	0,26	10,00	2,88	110275,3	68,79
Tebo	2011	0,29	6,05	3,25	6248,31	64,45
Tebo	2012	0,30	6,35	2,10	6729,42	65,23
Tebo	2013	0,30	6,86	0,73	7242,75	65,91
Tebo	2014	0,29	6,89	3,86	7881,38	66,63
Tebo	2015	0,37	7,12	1,94	8302,68	67,29
Tebo	2016	0,32	6,87	1,96	8750,64	68,05
Tebo	2017	0,27	6,79	1,98	9239,25	68,16
Tebo	2018	0,31	6,58	2,00	9699,61	68,67
Tebo	2019	0,26	6,47	2,90	10160,98	69,02
Tebo	2020	0,30	6,26	2,95	10158,89	69,14
Tebo	2021	0,30	6,68	2,83	10597,49	69,35
Tebo	2022	0,30	6,34	1,38	77361,68	69,78
Bungo	2011	0,34	5,35	3,07	7703,63	66,7
Bungo	2012	0,36	5,55	3,43	8446,78	67,20
Bungo	2013	0,33	5,25	4,38	9208,47	67,54
Bungo	2014	0,35	5,12	6,34	9829,56	67,93

Bungo	2015	0,35	5,70	2,98	10333,81	68,34
Bungo	2016	0,34	5,99	3,94	10891,04	68,77
Bungo	2017	0,34	5,82	4,89	11510,1	69,04
Bungo	2018	0,32	5,78	3,03	12045,8	69,42
Bungo	2019	0,33	5,60	3,82	12549,93	69,86
Bungo	2020	0,31	5,80	5,94	12494,42	69,92
Bungo	2021	0,30	6,23	5,86	13133,52	70,15
Bungo	2022	0,32	5,38	5,50	75255,07	70,55
Kota Jambi	2011	0,36	9,27	3,60	11932,76	72,96
Kota Jambi	2012	0,36	9,80	4,89	12848,14	73,78
Kota Jambi	2013	0,34	8,91	7,44	13939,74	74,21
Kota Jambi	2014	0,33	8,94	10,13	15080,23	74,86
Kota Jambi	2015	0,39	9,67	7,32	15851,95	75,58
Kota Jambi	2016	0,38	8,87	6,44	16936,44	76,14
Kota Jambi	2017	0,39	8,84	5,55	17728,34	76,74
Kota Jambi	2018	0,33	8,49	6,41	18667,87	77,41
Kota Jambi	2019	0,34	8,12	6,53	19550,81	78,26
Kota Jambi	2020	0,34	8,27	10,49	18775,82	78,37
Kota Jambi	2021	0,35	9,02	10,66	19515,49	79,12
Kota Jambi	2022	0,36	8,33	8,95	124118,52	79,58
Sungai Penuh	2011	0,30	3,42	3,97	2770,91	70,55
Sungai Penuh	2012	0,32	3,66	6,57	2967,37	71,23
Sungai Penuh	2013	0,32	3,30	5,12	3218,24	72,09
Sungai Penuh	2014	0,34	3,33	10,81	3460,94	72,48
Sungai Penuh	2015	0,33	3,43	8,18	3705,36	73,03
Sungai Penuh	2016	0,33	3,13	6,16	3946,47	73,35

Sungai Penuh	2017	0,32	2,78	4,14	4183,87	73,75
Sungai Penuh	2018	0,30	2,76	5,13	4388,18	74,67
Sungai Penuh	2019	0,33	2,81	4,00	4607,81	75,36
Sungai Penuh	2020	0,31	3,03	5,56	4600,23	75,42
Sungai Penuh	2021	0,31	3,41	3,00	4768,84	75,70
Sungai Penuh	2022	0,29	2,97	2,49	25990,18	76,17

Lampiran B Hasil Estimasi Random Effect

Models

Dependent Variable: KETIMPANGAN
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 06/26/23 Time: 23:01
 Sample: 2011 2022
 Periods included: 12
 Cross-sections included: 11
 Total panel (balanced) observations: 132
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.318344	0.081964	3.883962	0.0002
KEMISKINAN	0.002479	0.002017	1.229021	0.2213
TPT	0.002165	0.001600	1.352939	0.1785
PDRB	-1.92E-07	1.12E-07	-1.711628	0.0894
IPM	-0.000445	0.001101	-0.404312	0.6867

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.017153	0.3130
Idiosyncratic random		0.025414	0.6870

Weighted Statistics			
R-squared	0.048666	Mean dependent var	0.123160
Adjusted R-squared	0.018703	S.D. dependent var	0.027388
S.E. of regression	0.027131	Sum squared resid	0.093484
F-statistic	1.624185	Durbin-Watson stat	1.599161
Prob(F-statistic)	0.172148		

Lampiran C Hasil Estimasi Fixed Effect Models

Sample: 2011 2022
 Periods included: 12
 Cross-sections included: 11
 Total panel (balanced) observations: 132

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.410353	0.109938	3.732600	0.0003
KEMISKINAN	0.011994	0.004283	2.800515	0.0060
TPT	-4.15E-05	0.001706	-0.024327	0.9806
PDRB	-3.90E-08	1.20E-07	-0.326641	0.7445
IPM	-0.002798	0.001384	-2.021710	0.0455

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.491002	Mean dependent var	0.313182
Adjusted R-squared	0.430096	S.D. dependent var	0.033665
S.E. of regression	0.025414	Akaike info criterion	-4.400379
Sum squared resid	0.075568	Schwarz criterion	-4.072787
Log likelihood	305.4250	Hannan-Quinn criter.	-4.267261
F-statistic	8.061670	Durbin-Watson stat	1.858162
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran D Hasil Estimasi Common Effect Models

Dependent Variable: KETIMPANGAN
 Method: Panel Least Squares
 Date: 06/26/23 Time: 22:51
 Sample: 2011 2022
 Periods included: 12
 Cross-sections included: 11
 Total panel (balanced) observations: 132

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.161355	0.062161	2.595752	0.0106
KEMISKINAN	0.001970	0.001127	1.748693	0.0828
TPT	0.004506	0.001735	2.596789	0.0105
PDRB	-2.32E-07	1.27E-07	-1.827219	0.0700
IPM	0.001769	0.000899	1.967118	0.0513
R-squared	0.154991	Mean dependent var		0.313182
Adjusted R-squared	0.128377	S.D. dependent var		0.033665
S.E. of regression	0.031430	Akaike info criterion		-4.044991
Sum squared resid	0.125453	Schwarz criterion		-3.935794
Log likelihood	271.9694	Hannan-Quinn criter.		-4.000618
F-statistic	5.823577	Durbin-Watson stat		1.258297
Prob(F-statistic)	0.000246			

Lampiran E Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7.723656	(10,117)	0.0000
Cross-section Chi-square	66.911179	10	0.0000

Lampiran F Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	21.739816	4	0.0002

Lampiran G Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM)

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	22.33760 (0.0000)	8.143513 (0.0043)	30.48111 (0.0000)
Honda	4.726267 (0.0000)	2.853684 (0.0022)	5.359835 (0.0000)
King-Wu	4.726267 (0.0000)	2.853684 (0.0022)	5.389850 (0.0000)
Standardized Honda	6.211263 (0.0000)	3.497420 (0.0002)	2.886084 (0.0020)
Standardized King-Wu	6.211263 (0.0000)	3.497420 (0.0002)	2.933683 (0.0017)
Gourieroux, et al.	--	--	30.48111 (0.0000)